

**JATUHNYA KERAJAAN PATANI DAN DAMPAK PERUBAHAN PADA
KEHIDUPAN MASYARAKAT MELAYU PATANI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

WAN YUNIL AMRI BIN WAN YUNIL KHAIRI
Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Nim: 511102679



FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH

2017/1438

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Jatuhnya Kerajaan Patani dan Dampak Perubahan Pada Kehidupan Masyarakat Melayu Patani*” dengan alasan penulis mengangkat judul tersebut adalah untuk menyampaikan sejarah perjuangan umat Melayu Patani dalam upaya integrasi Pemerintahan Thailand. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jatuhnya Kerajaan Patani dan apa saja kebijakan Rezim Pemerintahan Thailand terhadap umat Islam Patani dan bagaimana umat Islam Patani dibawah Rezim Pemerintahan Thailand. Tujuan penelitian ini yaitu pertama: untuk mengetahui faktor-faktor apa saja jatuhnya Kerajaan Patani., kedua, untuk mengetahui apa saja kebijakan Rezim Pemerintahan Thailand terhadap umat Islam Patani., dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana umat Islam Patani di bawah Rezim Pemerintahan Thailand. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, maka data penelitian ini menggunakan metode historis yang bersifat deskriptif analitis. Tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini terdapat 4 tahapan, di antaranya: Heuristik (Pengumpulan Data), Verifikasi (Kritik Sumber), Interpretasi (Analisis Sejarah) dan Historiografi (Penulisan Sejarah). Adapun hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Jatuhnya Kerajaan Patani disebabkan perebutan kuasa dalam kalangan raja-raja Patani dan krisisnya pucuk pimpinan., Kedua, dengan ditanda perjanjian perbatasan antara Inggris dan Thailand, Patani Raya mulai menjadi bagian integrasi Pemerintahan Thailand yang berasaskan konsep Nasionalisme, Kebudayaan Siam/Thai dan agama Budha., Ketiga, dampak dari kebijakan pokok pemerintahan Thailand terhadap umat Islam dari segi yaitu; ekonomi, politik, budaya dan pendidikan, yang tidak biasa oleh masyarakat Melayu Patani, karena kebijakan-kebijakan tersebut telah mencabut hak-hak masyarakat Melayu Patani sebagai bangsa yang merdeka. Bagi masyarakat Melayu Patani tidak pernah merasa sebagai bagian dari bangsa Thai. Oleh karena itu, mereka tidak ingin diatur oleh Bangkok, mereka ingin mengatur diri mereka sendiri.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, dengan kasih sayang dan Hinayah-Nya karya ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta ahlul baitnya. Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul: ***Jatuhnya Kerajaan Patani dan Dampak Perubahan Pada Kehidupan Masyarakat Melayu Patani*** yang belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, Segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada Ibuk Marduati, M.A, selaku Penasihat Akademik, Prof. Dr. Misri A. Muchsin M. Ag, selaku pembimbing I, dan Drs. Anwar Daud, M. Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan, dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Bapak Syarifuddin, MA., Ph.D, ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Ibu Marduati, M.A dan semua dosen dan asistennya Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Teristimewa kepada ayahanda Wan Yunil Khairi bin Wan Yaacob dan ibunda Som binti Watih yang telah memberikan asuhan, dorongan, dan kasih sayang kepada penulis. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat serta rekan-rekan seperjuangan Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam angkatan 2011 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhanya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat. *Amin ya Rabbal 'Alamin. Billahi Taufiq Wal Hidayah.*

Banda Aceh,

Penulis

DAFTAR ISI

LAMPIRAN PENGESAHAN JUDUL.....	
LAMPIRAN PENGESAHAN SIDANG	
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Penjelasan Istilah	4
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka	6
G. Metode Penelitian	8
BAB II: KERAJAAN PATANI DALAM KONTEK HISTORIS	10
A. Masuknya Islam di Thailand.....	10
B. Berdirinya Kerajaan Patani.....	16
C. Kemajuan Kerajaan Patani.....	23
BAB III: KEJATUHAN KERAJAAN PATANI DAN DAMPAK BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT MELAYU PATANI	
A. Kemunduran dan kejatuhan Kerajaan Patani.....	27
B. Kebijakan Rezim Pemerintahan Thailand terhadap umat Islam Patani	34
1. Bidang Ekonomi	37
2. Bidang Politik	39
3. Bidang Budaya dan Pendidikan.....	43
C. Umat Islam Patani dibawah Rezim Pemerintahan Thailand	48
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN FOTO	59
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etnis Melayu di Selatan Thailand pada mulanya merupakan suatu kerajaan tersendiri ditinjau dari segi historis, yang dikenali sebagai kerajaan Patani Raya. Dari permulaan abad ke XIV awal akhirnya dinasti muslim hingga akhir abad ke XVIII, Patani Raya merupakan kerajaan merdeka, namun sejak akhir abad ke XVIII, kerajaan ini merupakan taklukan raja Siam/Thai.¹

Pada tanggal 10 Maret 1909, saat ditanda tangannya perjanjian perbatasan antara wilayah jajahan Inggris di Semenanjung Malaya dan kerajaan Siam, daerah Patani Raya itu secara definitif mulai menjadi bagian integral dari Kerajaan Siam. Hasilnya terjadilah pembaharuan administratif di Patani seperti yang dikehendaki oleh Chulalokong (RamaV).² Ditandai dengan menempatkan para hakim, gubernur, wakil gubenur serta para pegawainya di tempat raja-raja Melayu berarti mulailah secara resmi menguasai langsung Bangkok terhadap Patani.

Sejak saat itulah otonomi budaya orang Melayu Islam mulai terancam. Sebab, pemerintah kerajaan Thailand mulai melakukan berbagai program pembaharuan, yang bertujuan untuk menggantikan indentitas kultural dan agama

¹ Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Selangor: Perpustakaan Negara Malaysia, 2006), hlm. 19

² Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Kedah: Pustaka Darussalam, 1994), hlm. 72

orang Melayu-Muslim dengan identitas kultural Thai yang berlandaskan Budhisme.³

Tanggal 24 juni 1932 pemimpin utama revolusi terdiri dari golongan berpahaman kiri seperti Pridi Phanomyong dan Phibun Songgram telah merampas kuasa atau *coup d'etat* di kota Bangkok sehingga mengambilalih kekuasaan pentadbiran dan menggumbal perlembagaan baru pada bulan Desember 1932.⁴

Pemerintahan baru ini melakukan pembaharuan di bidang administrasi. Program ini langsung menyentuh dasar-dasar eksistensi yang paling dalam, sentimen etnis, kultural, dan agama dikalangan orang Melayu semakin kuat. Rasa kebersamaan sebagai suatu kelompok etnis dengan budaya dan agama yang sama kian mengental. Ini berarti masyarakat Melayu tidak pernah merasa sebagai bagian dari bangsa Thai, sebab itulah Patani tidak ingin diatur oleh Bangkok, mereka ingin mengatur diri mereka sendiri.⁵ Dengan kata lain, mereka ingin merebut kembali otonomi sekurang-kurangnya dibidang budaya, hukum dan agama: hal-hal mendasar yang merupakan tujuan perjuangan mereka sejak tahun 1903 hingga sekarang.

Pemerintahan Thailand melancarkan program dengan tujuan untuk menjadikan semangat kebangsaan Thai/Siam sebagai pegangan hidup orang-orang Siam tidak terkecuali masyarakat Melayu. Pemerintahan percaya bahwa kesadaran hanya dapat dicapai melalui rancangan sosial-budaya yang berasaskan konsep

³ Mohd Zamber A. Malek, *Umat Islam Patani, Sejarah dan Politik*, (Shah Alam: Perpustakaan Negara Malaysia, 1993), hlm. 164

⁴ *Ibid...*, hlm. 182

⁵ Moeflich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru kebangkitang Islam*, (Bandung: FUKUSMEDIA, 2003), hlm. 261

nasionalisme, kebudayaan Siam dan agama Budha.⁶ Dengan kesadaran tersebut, pemerintahan yakin dapat menumbuhkan adat resam Siam.

Berdasarkan semangat tersebut pemimpin-pemimpin Siam mulai menyusun dasar untuk berasaskan kepada satu agama, bangsa, bahasa dan kebudayaan Siam. Untuk mencapai maksud tersebut, diadakan modernisasi dalam bidang pendidikan dan sistem komunikasi sahaja menambah kesadaran etnis dengan mempermudah kontak yang luas di antara anggota kelompok-kelompok bahasa dan etnis yang sebelumnya terasing.⁷ Demikian juga, modernisasi politik yaitu dalam keadaan pemusatan teritorial terhadap populasi agama atau bahasa dalam suatu suku bangsa, biasanya mendorong perlawanan berdasarkan batas entis.

Modernisasi ekonomi mengubah sejumlah sumberdaya atau metode pendistribusian sumberdaya tersebut kepada kelompok-kelompok tertentu. Dalam keadaan seperti itu, organisasi etnis bisa muncul sebagai suatu alat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik.⁸ Proses modernisasi atau perubahan struktural dalam suatu komunitas seperti perluasan pendidikan, urbanisasi dan semacam itu, tidak dengan sendirinya menghasilkan tindakan kolektif atau kekerasan kolektif, namun kesemuanya sangat mempengaruhi jumlah, identitas, dan organisasi para pesaing, yang pada gilirannya menentukan yang dominan dan inti dari tindakan kolektif. Skripsi ini

⁶ Nik Anuar Nik mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954...*, hlm. 55

⁷ Taufik Abdullah, Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 243

⁸ Pitsuwan, Surin, *Islam di Mungthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 68

akan mengkaji, sejauhmana perubahan kehidupan yang ditinjau dari kebijakan modernisasi pemerintahan Thailand terhadap Masyarakat Melayu Patani.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jatuhnya Kerajaan Patani?
2. Apa saja kebijakan Rezim Pemerintahan Thailand terhadap umat Islam Patani?
3. Bagaimana umat Islam Patani di bawah Rezim Pemerintahan Thailand?

Batasan masalah pada dasarnya konsep penulisan kehidupan masyarakat itu luas. Untuk lebih fokusnya perubahan kehidupan masyarakat penulis bahas hanya empat bidang sahaja yaitu: bidang Ekonomi, Politik, Budaya dan Pendidikan.

C. Penjelasan Istilah

Agar lebih jelas dan tidak salah pengertian terhadap istilah yang terdapat dalam pokok pembahasan ini, maka dalam penelitian ini perlu dibatasi istilahnya sebagai berikut:

1. Kerajaan Patani

Kesultanan Negeri Patani Besar yang mencakup daerah Narathiwat (Teluban), Yala (Jalor), dan beberapa daerah Senggora (Songkhla, bagian Sebayor dan Tibor), bahkan Kelantan, daerah Kuala Terengganu dan Pethalung (Petaling). Pada awalnya Kerajaan Patani diyakini berasal dari sebuah Kerajaan Hindu-Budha yang bernama Langkasuka pada 6M.

Kerajaan adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja.⁹ Adapun definisi kerajaan menurut penulis paham adalah kerajaan Melayu Patani baru merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Melayu Patani berdiri pada abad ke XV M. namun sebagian masyarakat Patani telah memeluk agama Islam 300 tahun sebelumnya.¹⁰

2. Perubahan Kehidupan/Sosial

Samuel Koenig mengatakan bahwa “perubahan sosial/kehidupan menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia”.f. definisi lain adalah dari Selo Soemardjan. Rumusannya adalah “segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.”¹¹

Adapun perubahan kehidupan/sosial yang dimaksudkan disini ialah dampak perubahan kehidupan masyarakat Melayu Patani setelah adanya kebijakan politik terhadap modernisasi di Thailand, yang mencakup minoriti muslim di Selatan Thailand.

3. Melayu Patani

Melayu Patani adalah negeri Melayu yang terletak di tanah Segenting Kra, selatan Thailand. Saat ini, daerah yang dulu disebut Patani ini telah terpecah

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm. 1133

¹⁰ Bangnara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, (Bangkok:TPR, 1976), hlm. 6

¹¹ <http://belajarpsikologi.com/pengertian-perubahan-sosial/>

menjadi 3 propinsi yaitu Patani, Yala dan Narathiwat. Istilah Patani dipakai dalam tulisan ini merujuk pada Patani di masa lalu, saat belum dipecah menjadi tiga propinsi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja jatuhnya Kerajaan Patani.
2. Untuk mengetahui apa saja kebijakan Rezim Pemerintahan Thailand terhadap umat Islam Patani.
3. Untuk mengetahui bagaimana umat Islam Patani dibawah Rezim Pemerintahan Thailand.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pemaparan tujuan tersebut, kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis.

1. Untuk memberi penjelasan apa saja kebijakan Rezim Pemerintahan Thailand terhadap umat Islam Patani.
2. Untuk memberi penjelasan tentang bagaimana umat Islam Patani dibawah rezim pemerintahan Thailand.

F. Kajian Pustaka

Penulisan tentang Jatuhnya Kerajaan Patani dan Dampak Perubahan Kehidupan Masyarakat Melayu Patani, terhadap kebijakan-kebijakan untuk memodernisasi masyarakat Melayu Patani, Selatan Thailand. Sejauh pengetahuan

penulis belum banyak ditulis/dibahas. Akan tetapi, ada beberapa karya tulis yang membahas topik yang berhubungan dengan judul tersebut, diantaranya:

Di dalam buku *Islam di Mungthai: Nasional Melayu Masyarakat Patani*, merupakan buku yang ditulis oleh Surin Pitsuwan. Buku ini membahas tentang sejarah masyarakat Melayu-Patani dan kebijakan pemerintah Thailand terhadap etnik Melayu-Patani serta membahas perlawanan masyarakat Melayu-Patani terhadap kebijakan pemerintahan pusat Thailand.

Di dalam buku Nik Anuar Nik Mahmud dengan judul *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, pada tahun 2006 yang diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, menjelaskan tentang sejarah perjuangan Melayu Patani, dan respon masyarakat Melayu-Patani terhadap kebijakan-kebijakan modernisasi Pemerintahan Thailand.

Di dalam buku M. Zamberi A. Malek dengan judul *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, pada tahun 1993 yang diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia, menjelaskan tentang gambaran umum Patani, Patani dibawah naungan Siam (Thailand), kebijakan-kebijakan Siam dalam upayanya untuk menguasai Patani.

Karya-karya diatas lebih banyak membahas tentang pergerakan perlawanan Kerajaan Patani dan Pemerintahan Thailand sementara pembaharuan-pembaharuan dibidang Bidang pendidikan, sosial masyarakat, ekonomi, sosial-politik. Belum banyak terkaji. Justru yang mengerakkan penelitian ini urgen untuk dilakukan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa-peristiwa masa lampau secara historis.¹² Metode historis memerlukan empat langkah dalam penulisan dan pengolahan data, yaitu:

Heuristik: yaitu pencarian dan pengumpulan sumber data baik dengan sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan sumber data penulisan skripsi ini menggunakan sumber-sumber sekunder dengan telaah *library research* (penggunaan bahan-bahan dokumen tertulis seperti buku-buku, majalah, catatan-catatan, dan kisah-kisah sejarah lainnya).¹³ Dalam melengkapi sumber-sumber sekunder, maka penulis akan menambahkan sumber primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari Patani serta beberapa peneliti mengenai Patani dan Thailand.

Kritik : setelah sumber-sumber data tersebut terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan keotentikan dan kredibilitas sebuah sumber data. Otentik dalam arti memilih mana sumber asli dan benar, sedangkan kredibilitas dalam arti menyelidihkan kritis terhadap sumber-sumber yang ada agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan informasi mengenai Patani dan Thailand.¹⁴

¹² Dudung Abdulrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 54

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Bumi Aksara: 2004), hlm. 20

¹⁴ Dudung Abdulrahman, *Metode Penulisan Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 99

Interpretasi : analisis terhadap sumber-sumber data yang telah diteliti kredibilitas dan keotentikannya, dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial. Kemudian penulis akan menemukan korelasi dan solusi baru mengenai tema yang akan dibahas.

Historiografi : tahap terakhir dalam prosedur penelitian sejarah, merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian dengan memperhatikan aspek kronologi sejarah. Yakni dimulai dengan bagaimana kondisi sosial Patani masa Kerajaan Siam hingga terjadinya perubahan kehidupan masyarakat Melayu Patani terhadap upaya modernisasi pemerintahan Thailand.

BAB II

KERAJAAN PATANI DALAM KONTEKS HISTORIS

A. Masuknya Islam Ke Patani

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Patani memeluk agama Budha dan Hindu. Keberadaan orang-orang Hindu juga berdasarkan catatan beberapa pengembara yang diketahui bahwa di Patani ditemukan beberapa orang kaum Brahmin dari India yang tinggal di istana raja yang dikenali dengan nama Bhaga Datta. Bukti ini menunjukkan bahwa agama Brahmana Hindu telah ada sejak tahun 450 M¹.

Setelah bertahun-tahun lamanya orang Siam dan Hindu tinggal dan berbaur, lama-kelamaan kekuasaan orang Hindu tergantikan oleh orang-orang Siam. Bertahun-tahun orang-orang Siam berdiam dan memerintah di Tanah Melayu, sinarannya tergantikan masa kerajaan Sriwijaya² dari Sumatera datang ke Tanah Melayu dan menaklukan negeri. Kerajaan Sriwijaya pada mulanya menaklukan Nakorn Sri Thamarat pada tahun 775 M. kemudian mereka mengembangkan wilayah kekuasaannya ke Patani, karena kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Budha maka agama Budha ini disebarkan ke seluruh penjuru Patani, maka orang-orang dari agama Hindu konversi menjadi

¹ Dida Nuraida, *Kemajuan Ekonomi...*, hlm. 29

² Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Palembang, Sumatera yang berada sekitar abad ke-7, Sriwijaya sebagai kerajaan yang terbesar wilayah kekuasaannya mencakup Nusantara dan semenanjung Malaya, lihat juga R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II* (Yogyakarta: Kunisius, 1991), hlm. 37

agama Budha, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah berhala Budha di Goa Wad Tham di daerah Yala sekarang.

Dalam buku Ahmad Fathy Al-Fatani, Langkasuka memasuki masa keemasan pada masa Budha, saat itu kerajaan Sriwijaya bersatu dengan Kerajaan Sailendra di Jawa dan membentuk suatu kuasa yang sangat besar, kerajaan Sailendra di Jawa memilih Patani untuk pusat pemerintahan di Tanah Melayu. Kerajaan ini dijalankan tanpa menggunakan kuasa tentara dan birokrasi tetapi menggunakan kuasa laut dan perniagaan melalui penguasaan pelabuhan-pelabuhan yang penting³.

Kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai tiga masalah pokok: tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah data yang dapat mendukung suatu teori tertentu, tetapi juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada⁴.

Dengan teori masuk Islam di Nusantara dan Patani pada khususnya, memang masih diperdebatkan. Ada satu teori yang mendukung tetapi masih kurang data. Islam masuk Patani mulai abad ke X, Islam masuk ke Patani dan Pahang terlebih dahulu baru Islam ke Malaka, dalam sejarah negeri Kelantan mengataka pada tahun 1150 M. Ada salah seorang dari Patani yang meyebarakan

³ Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah...*, hlm. 4-8

⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2013), hlm. 2

Islam di negeri itu, ini menunjukkan bahwa Islam memasuki Patani terlebih dahulu sebelum berdiri kerajaan Sukhotai 1219 M.

Keberadaan masyarakat Islam di wilayah Patani telah ada sekitar abad ke XI M. hal ini didukung dengan pernyataan Zamberi A. Malek yang menyatakan bahwa meskipun Kesultanan Patani baru berdiri sejak abad ke XV M. namun sebagian masyarakat Patani telah memeluk agama Islam 300 tahun sebelumnya⁵.

Perkembangan Patani dimulai pada kurun waktu abad ke XIV dan XV sejalan dengan pesatnya bidang perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kedudukannya secara geografis cukup strategis dimana Patani berada di pertengahan jalur lalu lintas perdagangan antara negeri Melayu dan negeri Asia Timur dan di antara perairan selat Malaka serta Laut Sulu dengan perairan laut Cina Selatan. Jalur tersebut merupakan jalur perdagangan yang sangat terkenal, merupakan jalur perkapalan antara bangsa yang menghubungkan tanah Arab dan India bahkan dengan daratan Cina. Patani dipandang sebagai pusat komersial yang penting untuk melayani pedagang-pedagang Islam Arab, India, Eropa maupun Cina. Disamping itu, Patani merupakan kerajaan kehilangan daerah yang cukup luas dan padat penduduk di semenanjung laut Cina Selatan⁶.

Awal berdirinya Kesultanan Patani, mulainya kontak hubungan yang dilakukan Kesultanan Pasai, yang berdasarkan persamaan bentuk dan jenis batu nisan Raja Patani dan Raja Pasai yang pertama beragama Islam. Hal ini terdapat

⁵ Ayah Bangnara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, (Bangkok: TPR, 1976), hlm. 6-7

⁶ P. Rudolf Yuniarto, *Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atas Dominasi "Nasional Thailand"*, Jurnal, pdf.

tulisan dalam Hikayat Patani yang menjelaskan awal mula terbentuknya Kesultanan Patani, dalam tulisannya tersebut diterangkan bahwa ketika Raja Patani yang bernama Phaya Tu Nakpa sakit ia mengadakan pengumuman kepada masyarakat untuk mengobatinya dan berjanji akan dijadikan sang menantu raja karena raja memiliki seorang putri dan dua orang putra, jika berhasil menyembuhkan penyakitnya⁷.

Pengumumanpun terdengar oleh seseorang yang berasal dari Pasai, ia bernama Syekh Sa'id pada kesempatan itu ia berjanji akan menyembuhkan sang Raja dengan syarat agar Raja siap menerima Islam sebagai agamanya. Rajapun mau memenuhi syarat itu dan pada akhirnya Raja sembuh namun demikian Raja mengingkari perjanjiannya dan pada akhirnya Raja sakit kembali hingga tiga kali ia merasa sakit pada sakitnya yang kedua ia juga mencari Syekh Said namun Syekh Sa'id berkata "*kamu telah ingkar janji*". Hal itu yang menyebabkan kesembuhan raja tidak bertahan lama, perjanjianpun dibuat kembali namun pada sakitnya kali ketiga dia juga masih ingkar pada akhirnya dia pun sakit kembali.

Pada sakit yang ketiga ia pun mencari Syekh Said kembali namun demikian Syekh Said kembali menjelaskan akan ingkar janji yang dilakukan sang Raja pada akhirnya perjanjianpun dibuat. Pada sakit yang ketiganya ini raja benar mengikuti apa yang dijanjikan, kemudian rajapun memeluk Islam. Masuknya raja ke agama Islam serentak diikuti oleh penduduk Patani yang beryakinan bahwa agama raja adalah agama rakyat, namun masyarakat Patani yang berada di

⁷ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani...*, hlm., 25

kejauhan belum menyatakan Islam. Dengan Islamnya Raja, rajapun mengganti namanya dengan nama Sultan Ismail Syah Zillullah Fil-Alam. Dan setelah itu Sultan memohon agar tiga anaknya juga diberikan nama.

Anak pertama Sultan Keruk Pacai Paina di beri nama: Sultan Mudzaffar Syah, anak kedua Siti Aisyah dan anak ketiganya diberi nama Sultan Mansur Syah⁸. Setelah peristiwa itu, Sheikh Said di berikan sebidang tanah untuk rumahnya dan sekaligus sebagai pusat agama yang di berinama kampung Pasai yang hingga kini daerah kampung Pasai masih ada di daerah Patani. Demikianlah dengan peristiwa itu terjadi yang menandakan kehadiran sebagai kekuatan baru kerajaan Patani kearah kegemilangan Kesultanan Islam Patani.

⁸ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani...*, hlm. 31

Silsilah Raja-raja Patani (Menurut Hikayat Patani)

Phya Tu Kerup
Mahayana
Kota Mahligai

Phya Tu Antara
Sultan Ismail Syah
(Raja Patani 1)

Kerap Phicai Paina
Sultan Muzafar Shah
(Raja Patani 2)

Siti Aisyah(Tengku Mahachai)
-X- Raja Jalaluddin Raja Sai
(Pemangku Bagi 4)

Mahachai Pailang
Sultan Mansur Shah
(Raja Patani 3)
(k. 1564-1572)

Sultan Patik Siam
(Raja Patani 4)
(k. 1572-1573)

Raja Bambang
(l. 1533-m. 1573)

Sultan Bahdur
(Raja Patani 5)
(k.1573-1584)

Raja Hijau
(Raja Patani 6)
(k.1584-1616)

Raja Biru
(Raja Patani 7)
(k.1616-1624)

Raja Ungu-X- Sultan
Abd. Ghafar, Pahang
(Raja Patani 8)
(k.1624-1635)

Raja Emas
Kerecang

Raja Bima

Raja Kuning
(Raja Patani 9)
(k. 1635-1688)

Keterangan: k = kerajaan, l = lahir, m = Mangkat⁹.

⁹ Ahmad Fathy al-Fatani, *PengantarSejarah...*, hlm. 16

B. Berdirinya Kerajaan Patani

Patani dahulu merupakan sebuah kerajaan yang memiliki kesultanan tersendiri yang mana masyarakat Patani pada umumnya adalah satu komunitas ras Melayu yang beragama Islam dan mazhab Syafi'i, mereka menggunakan bahasa dan budaya Melayu. Masyarakat dan kerajaan ini telah terwujud sebelum berdirinya Kerajaan Sukhothai yang berdiri sekitar abad ke XII M. Pada masa itu kerajaan ini merupakan salah satu negeri yang aman makmur dan berpengaruh di Asia Tenggara.¹⁰

Pada masa dahulu Patani bukan bagian dari Thailand sekarang, tetapi ia merupakan sebuah Kerajaan yang memiliki pemerintah dan kekuasaan sendiri yang menguasai wilayah-wilayah di Thailand Selatan.¹¹ Bahkan wilayah Kelantan dan Terangganu termasuk dalam kekuasaan Patani yang sekarang menjadi negara bagian Kerajaan Malaysia.

Patani mempunyai sejarah yang cukup lama, jauh lebih lama dari negeri-negeri di semenanjung Melayu seperti Malaka, Johor, dan Selangor. Sejarah lama Patani menunjuk kepada Kerajaan Melayu Tua yang mendapat pengaruh Hindu India bernama Langkasuka. Kawasan Timur Langkasuka meliputi daerah Pantai Timur Semenanjung, mulai dari Songgora, Patani, Kelantan sampai Trengganu,

¹⁰ A. Bangnara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, (Bangkok: Penal Penyelidik Angkatan al-Patani, 1967), hlm. 7

¹¹ Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Kedah Darul Aman: Pustaka Darussalam, 1994), hlm. 1

termasuk juga kawasan utara negeri Kedah.¹² Langkasuka terletak di daerah Patani sekarang, sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli antropologi di *Prince of Songkla University* di Patani, yang dikuatkan juga oleh sejarawan lain seperti Prof. Zainal Abidin Wahid, Prof Hall dan Prof Wheatly. Beberapa alasan telah dikemukakan kenapa Langkasuka disebut sebagai bertempat di Patani (lihat lampiran 1), dan tidak seperti penemuan di Kedah.¹³

Menurut Hikayat Patani, kerajaan Patani berasal dari kerajaan Melayu yang berpusat di pedalaman dan sukar untuk didatangi oleh para pedagang. Raja Patani ketika itu memindahkan pusat kerajaannya ke sebuah perkampungan nelayan yang akhirnya diberi nama Patani letaknya yang strategis dari segi geografis, Patani menjadi tumpuan para pedagang dari Timur maupun Barat, untuk singgah disana sambil beristirahat ataupun berdagang. Patani menjadi pusat perdagangan ketika itu, Menurut ahli antropologi, orang Patani berasal dari suku Jawa-Melayu. Bahwa suku inilah yang pertama kali mendiami tanah Melayu, kemudian berdatangan pedagang Arab dan India ke daerah Patani.¹⁴

Menurut sumber Cina bahwa, Langkasuka ialah semasa dengan pemerintah Dinasti Liang (502-556 M.) dalam sumber karangan Yao Si Lien pada tahun 629 M. Yang berjudul Liang Shu semua 56 jilid, menyebutkan negeri Langkasuka sebagai Lang-Ya-Hsiu, telah muncul sejak abad ke II M. Atau sekitar

¹² Malik Ibrahim, "Seputar Gerakan Islam di Thailand Sesuatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal", *Jurnal*, Vol. 10, No.1, (Penang: Febuari 2012), hlm. 5

¹³ Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar...*, hlm. 3

¹⁴ <http://minang.awardspace.com>. Islam di Patani

tahun 100 M. Bukti-bukti lain adalah dari catatan seorang pengembara terkenal I-Ching (I-Tsing) pada masa pemerintah Dinasti Sung (960-1267 M.) dalam buku *Memoris*. Ia menceritakan tentang rombongan Cina yang sedang pelayaran menuju ke India. Setelah melintasi Negara Funan, mereka tiba di Negera Kota yang di sebut sebagai Lang Chin Shu. Kedatangan mereka disambut meriah dengan penuh upacara penghormatan oleh Raja Lang Chin Shu. Berdasarkan catatan Cina di atas para ahli sosiologi dan sejarawan Cina tetap sepakat bahwa nama Lang Chin Shu adalah pengenalan kepada Melayu Lang Chin Shu adalah pengenalan kepada Melayu Langkasuka.¹⁵

PETA

LETAKNYA KOTA LANGKASUKA



Sumber : <https://www.google.co.id/search>.2017

Foto 1 : Gambaran letak kerajaan Langkasuka dan letak kota Mahligai

¹⁵ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani, Sejarah dan Politik*, (Pustaka Malaysia: HIZBI, Shah Alam, 1993), hlm. 2-3

Demikian juga dengan catatan Barat, seorang ahli astrologi asal Greek yaitu Claudius Ptolemy dalam karya buku *Geographia* pada tahun 150 M. mencatat bahwa teluk Patani sebagai teluk Perimoulikus. Teluk ini sangat sesuai dijadikan tempat persinggahan para pedagang, kedudukan Bandar Patani yang sangat strategis itu menarik bagi para pedagang asing.

Dalam, Kitab Tarikh Patani karangan *Maulana al-Syakh Faqih Ali bin Muhamamad bin Shafiuddin* disebutkan bahwa :

*Patani pada zaman dahulu itu ialah pelabuhan besar bagi Negara Langkasuka dan tempat sangat masyhur perniaga dan pedagang. Rajanya bernama Maha Wangsa memerintah Negara Langkasuka, anaknya yang ramai telah dihantar memerintah dimerata-rata kawasan Langkasuka dan salah seorang di Patani.*¹⁶

Perubahan nama Langkasuka menjadi Patani disebutkan dalam Hikayat Patani karya A. Teeuw dan D. K. Wyatt, negeri Patani berasal dari kata Pak Tani. Dalam Hikayat tersebut menceritakan bahwa Phya Tuk Naqpa anak dari Phya Tub Kerub Mahajana keturunan dari raja Langkasuka yang memerintah kota Mahligai (**photo 1**).¹⁷ Letak kota Mahligai yang berada di pedalaman menyebabkan Phya Tuk Naqpa berinisiatif untuk memindahkan ibukota kerajaan lebih ke pesisir. Hal ini berpengaruh terhadap sektor perdagangan yang menyebabkan sulitnya para saudagar dari wilayah luar Patani untuk bertransaksi jual beli jika pusat kota berada di pedalaman sehingga perdagangan dan perniagaan kerajaan merosot.

¹⁶ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani...*, hlm. 5

¹⁷ Mahligai adalah Ibu kota Langkasuka, dipercayai kawasan tapak kota Mahligai terletak di Kampung Perawan, daerah Jering Patani.

Pengantian nama negeri Langkasuka menjadi Patani menurut Abdul Halim Bashah kaitannya dengan pembukaan negeri Patani yang dimulai sekitar tahun 1500 M. tahun ini ditetapkan sebagai tahun permulaan penyusunan raja-raja Patani yang diceritakan dalam Hikayat Patani.¹⁸

Sumber terdapat dalam Sejarah Hikayat Patani seumpamanya, mana Patani dicerita sampai sekarang ini :

*Maka titah bagiada, apa yang disalakkan oleh anjing itu? Maka sembah mereka sekelian itu. Daulat Tuanku patik memohon ampun dan kurnia. Ada seekur pelanduk putih besarnya seperti kambing, warna tubuhnya gilang-gemilang. Itulah yang hambat oleh anjing itu. Maka ditanyai oranglah pantai mana? Raja menjawab pantai ini. Hinggalah dipanggil orang Patani”.*¹⁹

Diceritakan Phya Tuk Naqpa berburu ke sebuah hutan yang berpangkal pada sebuah pantai, di pantai tersebut terdapat semua pondokan yang didiami oleh seorang yang bernama Pak Tani yang baik hati. Phya Tuk Naqpa melihat keadaan yang cukup memungkinkan untuk memindahkan kota Mahligai, maka Phya Tuk Naqpa memerintahkan negerinya pindah ke pesisir dan beliau menyebut negeri itu sebagai Pak Tani, namun lama-kelamaan karena faktor penyebutan maka disebutlah Patani²⁰ (ada perbedaan antara satu t’ dan dua t’)²¹.

¹⁸ Abdul Halim Bashah (Bahar), *Raja Campa & Dinasti Jembal Dalam Patani Besar, (Patani, Kelantan, Tarengganu)*, (Pustaka Reka, Kelantan, 1994), hlm.42

¹⁹ Ibid., hlm. 20

²⁰ Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar...*, hlm. 10-11

²¹ Perbedaan Patani dengan Pattani terdapat pada huruf “t” kata yang memakai satu huruf “t” itu adalah nama bagi negeri dan wilayah, sedangkan kata yang menggunakan dua huruf “t” (**Pattani**) adalah nama bagi sebuah provinsi di Selatan Thailand tetapi melalui beberap buah

Dengan hal ini para sarjana dan sejarawan banyak berbeda pendapat tentang pembukaan negeri Patani, berdasarkan fakta sejarah pada abad 14 M. (1370-1380 M.) karena pada saat itu Kerajaan Siam sudah buat hubungan dengan negeri Patani.

Patani²² sekarang merupakan salah satu provinsi minoritas etnis Melayu di Selatan Thailand, saat ini sedang menghadapi berbagai kendala yang signifikan, salah satu permasalahannya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Thailand.

Sejak Patani dijajah oleh Siam pada tahun 1785 M.²³ Mulai dari pada tahun tersebut orang-orang Melayu Patani di perlakukan secara tidak adil bahkan bertentangan dengan HAM,²⁴ karena masyarakat Melayu Patani dianggap melakukan aktifitas melawan kerajaan oleh pemerintah Thai, seperti pertama, Orang-orang Melayu Patani dianggap sebagai pendatang dan bukanlah orang pribumi. Kedua, orang-orang Melayu harus berbahasa Thai, dan dilarang berbahasa Melayu. Ketiga, orang-orang Melayu memakai kupiah dianggap sebagai kekerasan atau teroris. Keempat, mereka ditanggap dan dizalimi oleh tentera Thai, sedangkan mereka tidak dapat dibuktikan bersalah.

naskah kitab (Kulit muka) karya Syaikh Daud al-Fathani beliau mengubah dengan “**Fathani**” artinya cerdas atau pintar.

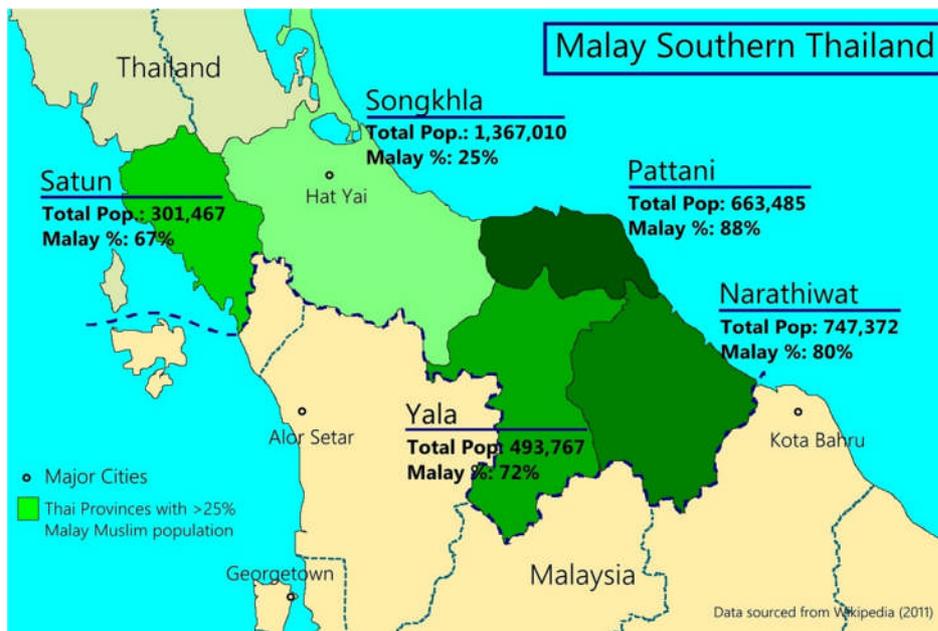
²² Patani atau Pattani dalam bahasa Thai, kalimat ini mengandung multi penafsiran, maka penulis akan menjelaskan dalam semua konteks. Karena nama Patani bisa punya empat makna, kota Patani, Provinsi Patani, Kesultanan Patani ataupun Patani Darussalam (Patani Raya).

²³ Ahmad Fathy al-fatani, *Pengantar Sejarah Patani...*, hlm. 197

²⁴ Hery Nurdi, *Perjuangan Muslim Patani, Antara Sejarah Penindasan dan Cita-cita Perdamaian di Patani Darussalam*, (Sabili Busplishing, 2010), hlm. 155

Setelah masyarakat Melayu di Patani merasa diri mereka diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintahnya sendiri, maka akhirnya masyarakat Melayu Patani bangkit untuk menuntut dipenuhinya hak-hak mereka. Disamping itu, masyarakat melayu Patani juga menuntut hak-hak otonomi dan atau kemerdekaan penuh, mereka merasa sudah sangat tersiksa selama terintegrasi dibawah pemerintahan penjajah Siam Thai.

PETA PROVINSI DI SELATAN THAILAND



Sumber : <https://www.google.co.id/search.2017>

Foto 2 : Letak kawasan penduduk Melayu di Selatan Thailand dan jumlah penduduk Melayu beserta persen bilangan etnis.

C. Kemajuan Kerajaan Patani Darussalam

Patani telah muncul sebagai pusat perdagangan penting di rantau ini sekitar abad ke XVI dapat dikatakan setelah jatuhnya Kerajaan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 M. Ijzerman, seorang pedagang Belanda, menyatakan bahwa Patani adalah “pintu masuk” ke wilayah China Selatan. Pengaruh Patani meluas sampai ke wilayah Semenanjung, seperti Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu Sekarang. Beberapa kali percobaan penyerangan oleh Kerajaan Siam/Thailand terhadap Patani dapat digagalkan, karena adanya bantuan dari Pahang, dan wilayah Melayu lainnya.²⁵

Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Syah, ia menggunakan waktu dengan mempelajari ilmu agama Islam tentang hukum Islam ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Masjid juga banyak didirikan pada masa pemerintahan Sultan Mansur Syah. Di Patani, Masjid tidak hanya dijadikan tempat ibadah tetapi juga tempat pengajaran agama Islam.²⁶

Selain mengembangkan Islam dalam negeri, Patani juga mengembangkan Islam ke berbagai wilayah. Patani mengutuskan orang-orangnya untuk menyebarkan Islam di luar Patani, seperti ke Campa maupun Nusantara. Meneruskan langkah penyebaran Islam ulama dari Patani dikirim ke berbagai wilayah di Nusantara maupun Semenanjung.

²⁵ Saifullah, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam Di Asia Tenggara*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 85

²⁶ Modh Zamberi A. Malek. *Patani dalam Tamadun Melayu*, (Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1994), hlm. 13-14

Dalam hal kesusteraan di Patani mulai berkembang tulisan Jawi yang semakin luas. Sistem pondokan mulai diperkenal di Patani, di antara pondok di Patani yang terkenal adalah Pondok Dala, Dermin, Semela, Dual, Kota, Geresik, Teluk Manak. Pelajar-pelajar yang datang tidak hanya dari negeri Patani sendiri tetapi juga dari negeri-negeri lainnya. Perkembangan bahasa Melayu juga mulai berkembang dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya khutbah disampaikan dengan bahasa Melayu.²⁷

Patani mencapai zaman keemasannya ketika diperintah oleh empat orang ratu yaitu; Raja Hijau (1584-1616), Raja Biru (1616-1624), Raja Ungu (1624-1635) dan Raja Kuning (1635-1651). Patani pada zaman Ratu-ratu sangat makmur dan kaya. Patani muncul sebagai pusat perdagangan penting dan menjadi pintu masuk bagi para pedagang yang hendak pergi ke Tiongkok dimana saat itu Patani memiliki hubungan perdagangan yang strategis dengan semua negeri di Asia Tenggara. Pada masa itu kekuatan ekonomi Patani menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang penting di Semenanjung Melayu, hal ini disebabkan oleh adanya iklim politik yang stabil, kondisi tersebut membuat ekonomi dan politik Patani terus tumbuh dan dihormati oleh negeri-negeri tetangga seperti Kerajaan Melayu Pahang dan Johor Bharu, termasuk juga Kerajaan Ayutdya di utara. Perdagangan Patani terus meluas hingga mencapai daerah-daerah nusantara; Palembang, Aceh, Batam, Batavia (Jakarta), Makasar hingga Ternate.²⁸

²⁷ Haji Abdul Halim, Bashah, *Raja Campa dan Dinasti Jembal dalam Patani Besar, Patani, Kelantan dan Terengganu*, (Kelantan: Pustaka Reka, 1994), hlm. 67-69.

²⁸ Wyatt dan David, K, *Thailand A Short History*, (Thailand: Silkworm Books, 1984), hlm. 23

Sebagai sebuah kerajaan, kekuasaan Patani terkenal dengan sebutan *Negeri Patani Besar*. Kecuali Johor, tidak ada negeri lain dibelahan Timur Semenanjung Melayu yang memiliki kemakmuran dan kekuatan sehebat Patani kala itu. Sumber kekuatan yang cukup besar ini ditunjang oleh ikatan tali perkawinan yang dilakukan oleh raja Ungu dengan sultan Pahang yang menguasai wilayah kerajaan Pahang.²⁹

Hal ini semakin mengukuhkan kekuatan Patani. Pada masa ini wilayah Patani tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik dan daerah komersial. Kedudukan Patani disemenanjung Siam/Thai yang strategis dari segi geografi, telah menyebabkan kota ini menjadi harapan pedagang-pedagang asing baik dari Barat atau Timur untuk singgah, beristirahat ataupun berdagang.

Dalam masa yang singkat saja Patani muncul sebagai sebuah kerajaan yang penting, maju dari segi ekonomi serta stabil dari segi politik dan pemerintahan. Selain itu dasar perhubungan antara bangsa yang baik telah menyelamatkan Patani dari kejatuhan kepada pihak penjajah-penjajah seperti kerajaan Siam, Inggris, dan Prancis.³⁰

Pada abad ke XVI kerajaan Patani berada dalam kemajuan dan kemakmuran. Patani menjadi pusat perdagangan yang pesat. Ketika itu, Ayudhaya (Kerajaan Siam) pun tidak dapat menandingi kemajuan perniagaan negeri Patani.

²⁹ Ahmad Umar Capakai, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam Selatan Thailand 1902-2002*, (Malaysia, UKM, 2000), hlm. 35

³⁰ Ahmad Fathy Al-Fathoni, *Pengantar Sejarah Patani...*, hlm. 12

Di samping kemajuan perniagaan, Patani juga terkenal sebagai pusat perkembangan Agama Islam yang terbesar di Asia tenggara.³¹

Kemajuan dan kemasyuran ini telah menimbulkan keinginan Kerajaan Ayudhaya (Kerajaan Siam) untuk menaklukkan dan mengesui negeri Patani. Kerajaan Ayudhaya telah beberapa kali melancarkan serangan pada negeri Patani tetapi tidak berjaya. Kemenangan Patani ini disebabkan oleh pertahanannya yang kuat. “Walau bagaimanapun, serangan Kerajaan Siam pada 1785, zaman Dinasti Chakri atau Rama I telah berjaya menundukkan kekuasaan Patani dengan paksa. Dengan itu kerajaan Patani berada dibawah taklukan kerajaan Siam (Thailand) sampai Saat ini”³².

³¹ A. Bangnara, *Sejarah Patani Dahulu dan Sekarang*, (Kota Bharu, Kelantan: Pustaka Aman Press, 1977), hlm. 03

³² Ahmad Umar Capakai, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam Selatan Thailand 1902-2002...*, hlm. 35.

BAB III

KEJATUHAN KERAJAAN PATANI DAN DAMPAK BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT MELAYU PATANI

A. Kemunduran dan Kejatuhan Kerajaan Patani

Menjelang akhir abad ke XVII, telah mulai kelihatan zaman kemundurannya, pada akhir pemerintahan raja Kuning. Namun, Patani dengan segala faktor perpecahan wilayah dan krisis pucuk pimpinan, telah menjadi “orang sakit di Semenanjung Melayu” selama abad ke XVIII berikutnya.

Raja Kuning yang memimpin antara tahun 1635-1686. Pada masa kepemimpinan Raja Kuning, ia lebih mengutamakan usaha dalam negerinya dengan mendirikan Sarekat Perdagangan Diraja Patani. Hubungan baik dilakukan dengan baik oleh Raja Kerajaan Patani dan Kesultanan Johor. Menjelang akhir pemerintahan Raja Kuning kegemilangan Imperium Melayu Islam mengalami kemunduran. Selain kemelut politik di dalam akibat perselingkuhan dengan Penari istana.¹ Selain itu, terdapat persengketaan dengan negeri Siam, karena usia dari Raja Kuning telah tua akhirnya Raja Kuning mundur dan berlindung di Kota Jimbal. ketika itu dipimpin oleh Sakti I Indera Atau Long Betong Raja Patani

¹ Yang Di Pertuan Muda Raja Johor Suami Raja Kuning, telah di sihir oleh Penari Istana yang bernama Dang Sirat. Baginda dikatakan telah hilang akal karena terlalu kasih pada Dang Sirat. Akibat dari godaan palsu itu, baginda tidak lagi bersemayam di istana besar, tetapi sering bersendirian di taman diraja *Rangkai Sakti* siang dan malam, lihat juga Mohd Zamber A. Malek, *Umat Islam Patani, Sejarah dan Politik*, (Shah Alam: Perpustakaan Negara Malaysia, 1993), hlm.

Kelantan. Selanjutnya Raja Kuning pun mangkat dan mengakhiri Seri Wangsa penggagas Kesultanan Patani.

1. Kesultanan Patani di bawah Dinasti Kelantan

Seperti yang telah di singgung di atas bahwa, setelah wafatnya Raja Kuning menandai habisnya keturunan Sari Wangsa dari penggagas Kesultanan Islam Patani dari Phaya Tu Nakpa. Namun demikian eksistensi Kesultanan Patani tidak terhenti sampai di situ.

Berdasarkan perundingan yang dilakukan oleh para pembesar Kesultanan Patani setelah menimbang tidak adanya keturunan yang pas untuk memimpin Kesultanan Patani pada akhirnya di putuskan bahwa keturunan dari Raja-raja Kelantan yang tinggal di Kampung Raja Bakal untuk menggantikan Raja Kuning untuk memimpin Kesultanan Patani.²

Hal yang demikian menandakan dimulainya Dinasti Kelantan memimpin Kesultanan Patani. Awal mula kepemimpinan Dinasti Kelantan dipimpin oleh Raja Bakar dan selanjutnya Raja Mas Kelantan yang memimpin Patani beberapa tahun dan pada perkembangan selanjutnya kepemimpinan dipegang oleh putranya setelah wafatnya Raja Mas Kelantan. Yaitu Raja Mas Jayam. Namun ia tidak meninggalkan seorang pewaris tahta, musyawarah pembesar pun dilakukan dan memilih Sultan Muhamad memimpin Kesultanan Patani.

² P. Rudolf Yuniarto, *Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atas Dominasi*, (Nasional Thailand, LIPI, Internet Format PDF), hlm. 5

Pada masa awal tiga Raja Kelantan, keadaan kesultanan sangatlah tenang dan aman tidak pernah diserang oleh musuh-musuhnya terutama orang-orang Siam Thai, akan tetapi kesultanan mengalami kemunduruan di bidang perniagaan di mana ketika Patani di pimpin oleh para Seri Wangsa Pelabuhan di Patani diisi oleh para saudagar dari Eropa dan hanya di isi oleh Saudagar dari China, Arab Jepang serta India Muslim.³

Kontak fisik dengan negeri Siam tidak terjadi selama kepemimpinan raja-raja tersebut dikarenakan terdapat serangan Burma terhadap Siam antara tahun 1767-1776 M. Setelah masa perang berlangsung Raja Muda Siam berniat mengirim utusan kepada Patani namun Sultan Muhammad telah mempersiapkan diri untuk menolak kehendak Raja Siam tersebut.

Hal ini memancing peperangan kontak langsung antara Siam dengan Patani namun persiapan Sultan Muhammad yang kurang baik dari segi peralatan tempur dan sumber daya manusia menyebabkan kalahnya Kesultanan Patani atas Siam dan setelah itu Undang-undang kesultanan berganti dengan perundang-undangan Siam kemudian menentukan seorang Sultan yang bernama Tengku Lamidin. Hal ini menandai hak penuh Siam atas Patani.

Meskipun demikian Sultan Lamidin yang diangkat oleh Siam itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi atas tanah kelahirannya yang telah terjajah oleh bangsa Siam hingga pada tahun 1789. Sultan Lamidin mengutus utusannya kepada Raja Annam (Vietnam) untuk bekerjasama melawan Siam, namun surat yang

³ Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani...*, hlm. 67

dikirim oleh utusannya malah di berikan kepada Raja Siam yang mengakibatkan marahnya Raja Siam dan pada akhirnya pada tahun 1791 Patani mendapat serangan kembali oleh Kerajaan Siam dan akhirnya mengalami kekalahan. Akhirnya, Siam memilih pembesar Melayu Patani kembali yaitu Datuk Pangkalan sebagai pemimpin di Patani.

Datuk Pangkalanpun membelot dari aturan yang telah ditetapkan Siam dan pada akhirnya Patani mengalami kekalahan dan pada perlawanan ini pula menandai berakhirnya kepemimpinan bangsa Melayu atas Patani. Setelah itu kerajaan Siam menaruh seorang dari Siam untuk memimpin Patani yang bernama Nai Khuan Sai.⁴

Pada perkembangan selanjutnya untuk memecah konsentrasi persatuan Bangsa kesultanan Patani, Patani di bagi menjadi enam wilayah yang masing masing memiliki pemimpin diantaranya :

- a. Tuan Sulong diangkat menjadi Raja Patani dan di tempatkan di Kota Griseik.
- b. Tuan Nik diangkat menjadi Raja Nongcik dan ditempatkan di Kota Nongchik.
- c. Tuan Mansur diangkat menjadi Raja Reman dan ditempatkan di Kota Baharu.
- d. Tuan Jalur diangkat menjadi Raja Jalur dan ditempatkan di Kota Jala

⁴ Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani...*, hlm. 81

- e. Nik Dah diangkat menjadi Raja Legeh dan ditempatkan di Kota Legeh
- f. Nik Dih diangkat menjadi Raja Sai dan ditempatkan di Kota Jerenga.

Seperti yang telah penulis paparkan eksistensi Kesultanan Patani berakhir dengan hilangnya otoritas Kesultanan Patani dalam memilih sultannya, yaitu Sultan Lamidin sebagai pemimpin Patani telah menjadi kesalahan bagi Siam karena pemimpin yang baru dipilih oleh Siam tersebut tidak membawa dampak positif bagi pemerintah Siam di Patani karena Datuk Lahmidin memberontak terhadap Siam dengan bantuan dari Raja Annam (Islam) dan bantuan Okphaya Cho so dan dibantu Syaikh Abdul Kamal (Ulama dari Makkah) untuk menyerang tentara siam namun meengami kegagalan dan memperburuk keadaan Patani.⁵

Setelah itu Patani dipimpin kembali oleh seorang yang dipilih langsung dari Kerajaan Siam yaitu Datuk Pangkalan. Namun setelah terpilihnya Datuk Pangkalan juga melancarkan pemberontakan yang akhirnya Patani dipecah kedalam tujuh wilayah administrative guna mencegah konsentrasi pemberontakan terhadap kerajaan Siam.

Tidak puas menguasai wilayah Patani, pada tahun 1821, Siam kemudian menyerang pula Kedah dan memaksa Sultan Abdullah. Raja Patani melarikan diri ke Pulau Pinag. Tujuan dari penyerangan ini adalah untuk mengurangi kekuasaan dan pengaruh Melayu di wilayah Patani. Kenyataan ini mengakibatkan

⁵ P. Rudolf Yuniarto, *Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atas Dominasi...*, hlm.7

kekosongan jabatan raja di Patani. Pada masa tahun 1817-1842, Patani telah diperintah oleh sekurang-kurangnya dua orang Raja Melayu. Orang yang pertama memegang jabatan itu ialah Tuan Sulong, yang kedua adalah anak Raja Bendahara Kelantan Long Jenal.⁶ Tuan Sulong yang bergelar Haji Sulong memegang jabatan hingga tahun 1832, tuan Sulong kemudian disingkirkan karena terlibat dalam kebangkitan anti-Siam pada tahun 1831. Gerakan anti-Siam ini mendorong pihak kerajaan melakukan upaya-upaya penyinkiran raja-raja dan tokoh Patani yang bertujuan tetap membuat kerajaan Patani dalam suasana kacau yang pada akhirnya melemahkan kekuatan-kekuatan sentrifugal anti-Siam agar tidak dapat bergerak leluasa.

Situasi Patani semakin terpojok dan dipinggirkan dengan diadakannya perjanjian antara pihak Kerajaan Inggris dengan Kerajaan Siam dalam hal pembagian wilayah. Situasi politik regional akibat adanya kolonialisasi Eropah di wilayah Asia mendorong Siam untuk merekonstruksi wilayah kekuasaan mereka untuk membendung arus imprialis yang ingin menguasai wilayah Semenanjung. Terlebih lagi wilayah seperti Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Patani yang di nilai amat baik untuk wilayah pelabuhan ekonomi dan pangkalan perang armada Inggris.

Tak ingin berdampak panjang akibat sengketa Inggris dan Siam, pada akhirnya Inggris memberikan hak atas Patani melalui perjanjian Inggris Siam pada tahun 1902.

⁶ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani, Sejarah Dan Politik...*, hlm.199

STRUKTUR
DARI KERAJAAN MELAYU PATANI MENJADI PROVINSI
THAILAND SELATAN⁷



Keterangan: Kronologi Pemerintahan Patani, lahir sampai berubah jadi Provinsi

⁷ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani, Sejarah Dan Politik...*, hlm. 191

B. Kebijakan Rezim Pemerintahan Thailand terhadap umat Islam Patani

Kebijakan rezim pemerintahan Thailand terhadap umat Islam Patani telah direncanakan pada awal pemerintahan Chulalangkorn, dengan mengenalkan kebijakan reformasi administrasi melalui konsep Thesaphiban tahun 1897. Namun, kebijakan reformasi tersebut mulai diimplementasikan pada tahun 1902 hingga 1906.⁸ Sistem ini, awalnya bertujuan untuk mengatasi kerusuhan dan pemberontakan Melayu-Muslim Patani yang terjadi pada waktu sebelumnya, dan penghalau kolonialisme Eropa yang mulai mengancam kebijakan integrasi wilayah (jajahan Siam).

Ada lima kebijakan politik atau program pokok pemerintahann Thailand diberlakukan terhadap masyarakat Melayu Patani untuk mengubah cara hidup, identitas, budaya dan sebagainya, kebijakan tersebut telah mencabut hak masyarakat Patani sebagai bangsa yang merdeka.⁹ Adapun lima kebijakan politik tersebut adalah:

a. Politik Dominasi

Suatu siasat yang dijalankan pemerintahan Thailand untuk merampas bumi Patani melalui kekerasan-kekerasan yang sporadis, tindakan ini dilakukan melalui dua hal tahap, yaitu: Pertama, menaklukkan Patani kemudia mengintegrasikan

⁸ Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslims Thailand*, (Bangkok: Thammasat university, 2003), hlm. 14

⁹ Faisol Hayee, Skripsi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Warga Minoritas Muslim Melayu Patani (Studi Kasus di Amphe Bannang Seta, Selatan Thailand)*, (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin, UIN AR-RANIRY, 2014), hlm. 45-46

kerajaan Patani sebagai suatu wilayah yang berada di bawah perlindungan kerajaan Siam Thai, dan kerajaan Patani harus menghantar bunga emas, dan diberi status sebagai negara yang otonomi di bawah naungan kerajaan Siam Thai (1902-1938). Kedua, melaksanakan politik yaitu, Patani dijadikan suatu wilayah dalam sistem pemerintahan negara Thailand dibawah konstitusi kerajaan, dan tidak dapat dipisahkan lagi di bawah dasar kesatuan negara Thailand.

b. Politik Eksploitasi

Pemerintah Thailand juga melakukan penindasan ekonomi terhadap bangsa Melayu Patani, yaitu mengeksploitasi semua sumber daya alam Patani, penindasan ini dilakukan dengan politik monopolistik demi kepentingan golongan mereka dan untuk pembangunan kerajaan Siam Thai di Bangkok, maka rakyat Melayu Patani merupakan hamba abdi, fakir melarat dan papa dalam tanah air yang penuh dengan kekayaan.

c. Politik Asimilasi

Merupakan salah satu cara penghancuran dan mempersiapkan kebangsaan Melayu, keturunan, sosial dan kultural. Politik ini dengan membawa penekanan ke atas rakyat Melayu Patani supaya mengakui di atas tiga konsep berikut:

- a) Kebangsaan Siam
- b) Kewarganegaraan Siam
- c) Keturunan Thai

Ketiga-tiga wacana nasional diatas telah di respon oleh masyarakat Melayu Patani dengan menolaknya, namun pemerintah Thailand merespon kembali dengan ancaman dan tuduhan melawan kerajaan dan berhak di cabur hak kewarganegaraannya.

d. Politik Divide and Rule

Satu cara untuk mengadu domba orang Melayu dengan cara bijak dari mereka sehingga menyebabkan orang Melayu Patani bertengkar sesama sendiri, dan juga secara tidak sadar masyarakat Melayu Patani telah dijadikan sebagai mata-mata bagi kaumnya sendiri.

e. Politik Transmigrasi

Strategi politik ini ditandai dengan pemindahan warga Siam yang beragama Budha dari Bangkok dan wilayah lain kedalam wilayah tinggal masyarakat Patani dengan cara membuka perkampungan baru atau *Nikkum Patana Sang Tua-eng*, ditempatkan warga Siam yang sengaja di pindahkan ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang baru datang (orang Siam yang beragama Budha) di antaranya penduduk asal dengan dicampur adukkan penduduk-penduduk dalam perkampungan itu.
- b) Untuk penyamaan rasio penduduk Thai Budha semua provinsi di Thailand, khususnya di wilayah pemukiman orang-orang Melayu-Patani.

1. Bidang Ekonomi

Kebijakan proses integrasi Patani ke dalam wilayah Thailand melalui penekatan pada kebutuhan ekonomi. Hal ini dilakukan, agar negara memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki sumber tenaga untuk mendukung pertahanan negara. Berdasarkan tujuan inilah dapat diketahui, jika tahapan adaptasi yang dilakukan Siam adalah untuk penguatan dan rasionalisasi administrasi dan pengembangan ekonomi.

Proses awal kebijakan tersebut pada tingkat ekonomi dan kesejahteraan sosial, pemerintah Thailand melakukan tahapan adaptasi melalui kebijakan eksploitasi koleksi karet dan pertambangan timah terhadap orang Patani dan pekerja migran, walaupun sebagian besar mata pencarian Melayu Islam Patani adalah nelayan.¹⁰ Di samping itu, pemerintah Siam juga mengenalkan sistem baru dalam koleksi pajak, seperti sistem pajak candu (pajak pertanian). Sistem ini berlangsung atas usulan Phya Sukhum, hasil pajak tersebut akan dibagi dua antara raja Siam dan raja Patani. Pada mulanya sistem pajak ini ditentang pihak Patani, namun Chulalongkorn meyakinkan bahwa sistem pajak ini sangat menguntungkan.

Tahun pertama berjalan cukup rapi, hasil pajak ini dibagikan ke tujuh Negara bagian Patani sebesar \$ 30,200 pertahun.¹¹ Situasi ini tidak berlangsung

¹⁰ Ibid hlm. 51

¹¹ Paulus Rudolf Yuniarto, "Integration of Pattani Malays: a Geopolitical Change Perspective", dalam *Multiculturalism, Separatism, and Nation State building in Thailand*, (Indonesia: Pusat Penelitian Sumberdaya Regional, 2004), hlm. 54

lama, setelah tahun kedua sistem pajak tersebut berjalan, Siam mengingkari perjanjian pajak yang telah disepakati. Hal ini benar-benar menimbulkan kemarahan raja Patani dengan mengancam akan melakukan tindakan yang lebih keras, karena menganggap Siam membahayakan otoritas raja Patani.

Sikap Siam yang berupaya mengingkari perjanjian pajak dengan Patani, merupakan faktor yang dapat memperburuk hubungan adaptasi yang telah dibangun sesuai dengan kesepakatan. Maka kemungkinan munculnya konflik sangat besar, karena proses adaptasi dan akomodasi sama-sama menekankan suatu pekerjaan yang membutuhkan penyesuaian, dan dalam tahapan ini kedua pihak yang melakukan kerjasama belum tentu berada dalam satu lingkaran kepentingan yang sama.

Dalam kasus Patani, konflik terjadi kembali akibat pelaksanaan daripada perjanjian pajak yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga dapat dikatakan, sistem pajak pertanian antara Siam dengan Patani sebagai langkah pertama integrasi tidak berhasil, akibat kelalaian dari pada pajak Siam sendiri. Di satu sisi, ketegangan akibat kelalaian tersebut menyeruak kembali, dan mendesak Siam menerapkan beberapa kebijakan politik untuk menyatukan persepsi dan tujuan dan tujuan masing-masing pihak yang akan berintegrasi.

Akan tetapi, Siam berhasil mengkonsolidasi beberapa sistem kebijakan demi mengatasi kemarahan dan kemungkinan terjadi pemberontakan di kalangan para raja dengan membangun beberapa akses sarana demi kebutuhan birokrasi dan mengatasi kemarahan raja Patani atas kebijakan-kebijakan di atas. Siam membuat

strategi pembangunan seperti yang dilakukan Inggris di Semenanjung Malaya. Siam mengutamakan pembangunan dalam bentuk prasarana jalan, pos-pos penjagaan keamanan bagi kegiatan komersial, serta pemukiman untuk orang Thai-Budha yang tinggal di wilayah Patani untuk menyimbangkan jumlah dominasi penduduk Melayu Islam Patani.¹²

2. Bidang Politik

Kebijakan politik integrasi Thailand terjadi dengan tidak melibatkan pihak Patani. Setelah Patani sejak awal dianeksasi, kemudian wilayah intern Patani dirombak berdasarkan kebijakan reformasi administratif yang dimulai tahun 1902. Maka untuk mematahkan kembali kekuatan Melayu Patani, wilayah Patani yang telah dibagi menjadi 7 provinsi kemudian dirombak menjadi empat provinsi yang lebih besar, yakni Patani, bangnara, Saiburi dan Yala.¹³ Satun merupakan sebuah distrik di Kedah juga dimasukkan menjadi wilayah Siam, yang diberi nama Provinsi Satun, perombakan ini terangkum ke dalam sistem Monthon (Monthon Patani) tahun 1906.

Konsep Monthon diperkuat pada Perjanjian Anglo-Siam 1909, dengan tujuan mengukuhkan kekuasaan Siam terhadap Patani secara mutlak dan menyerahkan Kedah, Terengganu, Perlis dan Kelantan kepada Inggris. Perjanjian ini ditandatangani antara Siam dengan kolonial Inggris, dan menyepakati Patani

¹² Surin Pitsuwan, *Islam di Mungthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani...*, hlm. 29

¹³ Bangnara adalah Provinsi Narathiwat yang resmi berganti nama menjadi Provinsi pada tanggal 10 Juni 1942. Provinsi Saiburi (Setul) dibubarkan dan dimasukkan ke dalam Provinsi Pattani pada tanggal 16 Februari 1931. Lihat W.K Che Man, hlm. 45

sepenuhnya menjadi bagian integral Thailand, dan wilayah Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Perlis diserahkan Siam kepada Inggris dan menjadi hak wilayah di bawah kekuasaan Inggris.

Kepentingan ekonomi dan konflik yang terjadi dengan Kerajaan Patani, menjadi faktor Siam tidak menyerahkan Patani ke tangan Inggris. Bagi Siam, Patani adalah ‘Permata’ yang paling berharga,¹⁴ terutama kerana potensi pelabuhan Patani yang pada saat itu diperebutkan oleh bangsa Eropa sebagai akses kepentingan komersial, kerana Patani adalah kerajaan Islam Melayu di Selatan yang tengah menjadi persengketaan antara Siam dengan Inggris. Selain itu, setelah Perang Dunia II berakhir, beberapa adaptasi di perbatasan antara Inggris dengan Myanmar, Inggris dengan Malaya dan Perancis dengan Indo-Cina terjadi, Komisi Internasional menentukan bahwa Thailand tidak punya hak untuk wilayah Indonesia dan Cina karena perbedaan entis, geografi, dan ekonomi. Dengan demikian, Indo-Cina menjadi hak teritorial Perancis.¹⁵

Proses kebijakan integrasi Pemerintah Siam mengalihkan sistem pemerintahan ke Bangkok, dan mencopot kekuasaan dan posisi raja atau Sultan dan menggantikannya dengan para birokrat Thai-Budha dari Bangkok dan provinsi-provinsi utara. Para bangsawan Patani kehilangan wewenangnya untuk

¹⁴ Nik Anuar Nik Mahmud, *Perjuangan Bangkok (1909) dan Implikasinya kepada Keselamatan dan Kestabilan Serantau*, Institut Alam dan Tamadun Melayu, hlm. 5. Akses dari situs <http://www.scrbd.com/doc/133353098/Perkanjian-Bangkok-19>. Diakses pada tanggal 02 Januari 2017, pukul 17:52 WIB.

¹⁵ Cahyo Pamungkas, “*The State Policies Towards Southern Border Provinces*”, dalam *Multiculturalism, Separatism, and Nation State Building in Thailand*, (Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI), 2004), hlm. 76.

memajaki rakyat, itu berarti mereka kehilangan sumber pendapatan berupa uang yang mereka pungut secara bersama-sama dari rakyat. Sistem pemungutan dan golongan wajib pajak diperluas hingga mencakup bidang pekerjaan dan perdagangan. Pembebasan pajak yang tadinya diberikan kepada para bangsawan dihapuskan. Kondisi ini, akhirnya menyadarkan para bangsawan untuk mengajukan beberapa syarat,¹⁶ sebagai berikut:

1. Agar semua anak cucu kaum bangsawan, termasuk anggota kerabat yang paling dekat, memperoleh penghasilan tahunan dari pemerintah,
2. Agar semua orang tersebut di atas dibebaskan dari pajak tahunan tanah,
3. Agar semua orang tersebut di atas dibebaskan dari kewajiban menjalani dinas militer, termasuk keharusan membayar uang sebagai pengganti kewajiban tersebut, agar semua yang bekerja demi kepentingan kaum bangsawan dibebaskan dari pajak perorangan.

Akan tetapi, pada tahun 1905 Siam yang diwakili oleh pangeran Damrong menteri dalam negeri menegaskan bahwa, kebijakan untuk mengakomodasi permintaan tersebut, bahwa para bangsawan Patani hanya akan digaji sesuai dengan pengabdian mereka kepada pemerintah, bukan karena status dan gelar mereka. Kedua, setiap ganjaran yang diberikan kepada kaum bangsawan diupayakan sebagai bentuk integrasi politik penuh ke dalam Siam, agar memperkecil rasa keterasingan dan menjaga agar tidak terjadi preseden buruk dalam memperkuat hasrat untuk merdeka pada generasi mendatang. Ketiga,

¹⁶ Surin Pitsuwan, *Islam di Mungthai: Nasional Melayu Masyarakat Patani...*, hlm. 26

pemerintahan hanya akan mengakui keturunan langsung dari para raja, karena permintaan kaum bangsawan tersebut hanya akan menjadi pemerinta mengakui keberadaan pasukan-pasukan yang dapat melawan otoritas pemerintah Siam.¹⁷

Selain kerugian yang didalam para bangsawan Patani, integrasi politik Thai Thailand juga berimbas kepada perekonomian rakyat Patani. Kesenjangan ekonomi semakin membuat jarak sosial antara Melayu Islam Patani, Thai-Budha dan Cina, posisi Muslim Patani berada di strata terendah. Mayoritas masyarakat Patani adalah produsen karet, namun dalam proses industrialisasi dan pemasaran orang-orang Thai-Budha dan Cina yang merasakan keuntungan yang lebih dibanding Melayu Islam Patani. Karena, orang-orang Thai-Budha dan Cina lebih menguasai sektor bisnis aspek komersial karet sebagai pemilik hutan tanaman dan dikembangkan oleh pemerintah Thailand.¹⁸

Sejak awal, kebijakan reformasi administrasi diterapkan, raja Chulalongkong sangat hati-hati dalam mengajukan pertimbangan-pertimbangan politik dalam rangka mengintegrasikan Melayu Islam Patani ke dalam negara dan bangsa Thai. Nampaknya, Chulalongkong menyadari perbedaan agama antara Thai dengan Melayu Islam Patani. Sementara pemerintah Thailand merancang hukum Islam diintegrasikan ke dalam struktur hukum dan undang-undang Thailand, hukum Islam tetap dibiarkan berjalan, dan mentolerir raja Patani

¹⁷ Ibid. hlm. 26-27.

¹⁸ Erni Budiwanti, "*Minoritas Muslim di Filipina, Thailand dan Myanmar: Masalah Represi Politik*", dalam Riza Sihbudi, *Problematika minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya*, (Jakarta: Puslitbang Politik dan Kewilayahan, LIPI, 2000), hlm. 128

memerintah dengan menggunakan hukum Islam.¹⁹ Namun, di atas berjalannya hukum Islam, pun harus berjalan di bawah undang-undang Siam, kecuali hukum waris dan hukum keluarga.²⁰ Damrong merumuskan agar diangkat enam qadi (hakim) Melayu Patani dan berhak memilih hakim penengah dari kalangan Thai. Segala keputusan berada pada kuasa hakim Melayu Islam Patani, namun keputusan akhir tetap berada di tangan hakim Thai. Hal ini dilakukan agar raja tidak mempergunakan pengaruh mereka kepada rakyatnya. Pemerintah Thai menyerahkan prosedurnya kepada raja atau sultan Patani.

Dalam ranah politik dan pemerintahan, pemerintah Thailand mengubah wilayah Patani menjadi sebuah provinsi, sekaligus mengubah struktur pemerintah Patani yang semula berbentuk kesultanan atau raja-raja, menjadi di bawah pengawasan gubernur yang di tunjuk langsung oleh pemerintah pusat Thailand di Bangkok.²¹

3. Bidang Budaya dan Pendidikan

Proses kebijakan integrasi Thailand terhadap Patani pun berlanjut pada bidang budaya, pendidikan dianggap alat utama dalam mempromosikan

¹⁹ Thenet Aphornsuvan, *History and Politics of The Muslims Thailand*, (Bangkok: Thammasat University, 2003), hlm. 15. Dengan demikian, secara berangsur hukum Islam (Syariah) dihapus.

²⁰ Bahkan dalam kasus keluarga warisan pun, keputusan hakim Muslim belum final jika tidak disepakati oleh hakim Thai.

²¹ Daerah-daerah di Asia Tenggara dibawah kontrol Amerika dan Thailand, kehilangan karakteristik sistem politik dan lembaga-lembaga pemerintahan Islam (kesultanan, sultanat). Tidak seperti daerah di bawah kontrol Inggris, ciri pemerintahan Islam masih dipertahankan meskipun menyesuaikan dengan ide-ide kolonial Inggris. (Howard Federspiel, *Sultans, Shamans, and Saints: Islam and Muslims in Southeast Asia*, United State of Amerika: University of Hawai's Press, 2007), hlm. 242

nasionalisme Thailand. Setelah pemerintahan raja Chulalongkon, putranya yang bernama raja Rama VI Vajiravudh (1910-1925) resmi menjadi raja Siam. Kebijakan Integrasi politik masa raja Vajiravudh adalah dengan menerapkan Undang-undang Pendidikan Nasional tahun 1921 yang memaksa setiap lembaga pendidikan di Thailand untuk menggunakan bahasa Thai.²²

Kebijakan ini, menyelenggarakan program pendidikan sekuler yang dilakukan oleh para rahib Budha, kepala desa, dan para pejabat pendidikan pemerintah. Pada tahap ini, pemerintah Thai mulai menekankan penggunaan bahasa Thai setelah tahun 1910. Ada upaya terpadu untuk mendidik Melayu Islam Patani menjadi Thai, dan ada kekhawatiran dari kaum bangsawan Patani, bahwa bahasa Thai akan mengarah para erosi dari bahasa dan budaya Melayu.²³

Setelah kematian raja Vajiravudh, tahta kerajaan Siam digantikan oleh raja Prajadhipok (1923-1935). Pada periode raja Prajadhipok, Siam memberlakukan kebijakan integrasi dengan mengkategorikan kebijakan tersebut menjadi dua, yakni *Politik Partisipation* (politik partisipasi) dan *Cultural Assimilation Policy* (politik asimilasi budaya).²⁴

Kebijakan politik partisipasi terjadi akibat adanya perubahan politik di internal Siam yang signifikan. Munculnya kudeta dari Partai Rakyat kekuasaan raja

²² Cahyo Pamungkas, "The State Policies Towards Southern Border Provinces", dalam *Multiculturalism, Separatism, and Nation State Building in Thailand...*, hlm. 67

²³ S.P. Harish, *Changing Conflik Identities: The Case of the Southern Thailand*, No. 107 (February 2006), (Singapore, Institute of Defence and Strategic Studies), hlm. 6

²⁴ Cahyo Pamungkas, "The State policies Towards Southern Border Provinces...", hlm. 72

(People's Party of the King's power) dan konflik internal pemerintah antara menteri Pertahanan, pangeran Bobaradej, dengan menteri Perdagangan, Pangeran purachatra.²⁵ Akibatnya, Bangkok mengalami krisis politik.

Di satu sisi, terjadi gerakan bawah tanah yang diprakarsai oleh cendekiawan kelas bawah, yaitu Mr. Pridi Panomyong. Tanggal 24 Januari 1932, beliau mendirikan lembaga politik untuk mengambil kekuasaan revolusi tanpa kekerasan. Inti dari UUD (undang-undang dasar) 1932, yaitu mengakui status raja sebagai kepala angkatan bersenjata dan pelindung Budha, serta penganut agama lainnya. Prinsip yang dianut dalam undang-undang tersebut, untuk mempertahankan dan menjamin pembebasan semua warga negara baik dalam politik maupun ekonomi.

Krisis politik yang dialami Siam saat itu, dan munculnya kebijakan integrasi politik partisipasi, dimanfaatkan oleh Melayu Islam Patani sebagai momentum dalam mengikuti pemilu dan mencalon diri sebagai perwakilan dalam Dewan Konsultatif.²⁶ Para kandidat dipilih oleh pemilih berasal dari kelompok intelektual yang didukung oleh para intelektual Islam. Surin Pitsuwan menyatakan bahwa tingkat partisipasi Melayu Islam Patani tergantung pada persepsi Siam tentang Islam Melayu di bawah perlindungan Inggris, jika kepentingan bersama Melayu Islam Patani baik yang ada di Patani maupun di Malaysia tersebut

²⁵ Ibid.

²⁶ Cahyo Pamungkas, *"The State policies Towards Southern Border Provinces..."*, hlm. 73-

dilindungi hak-haknya oleh pemerintah, maka Melayu Patani bisa berpartisipasi kepada politik pemerintah Thailand.

Namun, peran dan pengaruh parlemen sangat terbatas dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Melayu Patani dan untuk mengurangi campur tangan Inggris di Malaysia. Lembaga tersebut tidak memiliki otoritas atau kekuatan untuk mengendalikan atau menjalankan serangkaian kebijakan pemerintah di semua negara. Kebijakan berada di bawah pengawasan dan kontrol dari angkatan bersenjata dan biokrasi, karena itu, Melayu Islam Patani selalu menghadapi gencatan senjata dengan angkatan bersenjata pemerintah Thailand jika terjadi konflik.

Selain, kebijakan politik partisipasi, Siam juga mengintegrasikan Patani ke dalam politik asimilasi budaya. Selain pendidikan sebagai alat utama dalam mengintegrasikan budaya Patani ke dalam Thai, pemerintah Thailand juga mengintegrasikan Patani ke dalam praktik birokrasi orang-orang Melayu. Di antaranya, dengan memaksa para pejabat Melayu Islam Patani melamar pekerjaan ke daerah-daerah utara yang didominasi oleh orang-orang Thai-Budha, dan dipertegas dengan himbuan dan instruksi agar para pejabat Melayu Patani tersebut ditugaskan ke daerah itu agar sikap dan wibawa mereka seperti orang-orang Thai. Setelah itu, akhirnya keturunan para raja ditawarkan pelatihan kerja

dari gubener Thai sebagai proses setelah Siam berhasil mengintegrasikan para raja atau pejabat Melayu Islam Patani.²⁷

Pada batas tahun 1932, Siam merubah indentitas politik Monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Pada tahun inilah, dimulai harapan dan impian baru akan perubahan nasib orang-rang Patani menjadi lebih baik, agar pemerintah Siam berpihak dan mendukung hak kemerdekaan bagi rakyat patani. Namun, sebaliknya, Siam semakin mengukuhkan proses integrasinya dengan memulai pendidikan nasional untuk mengartikulasikan kesatuan Thailand, yang bertujuan menyatukan semua etnis, tidak hanya etnis Melayu melainkan juga etnis Cina dan lainnya yang ada di wilayah Thailand.²⁸ Dalam program ini, pemerintah menetapkan bahwa:

1. Negara memiliki hak untuk mendidik rakyat.
2. Negara memiliki otoritas penuh untuk mengontrol dan memantau program pendidikan di pemerintah dan sekolah swasta.
3. Setiap individu yang telah lulus wajib belajar bearti dia adalah warga negara yang mampu mendapatkan sumber daya hidup yang penting untuk bekerja, dan dia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, juga bisa membuktikan dirinya secara fungsional melalui di luar pekerjaannya.

²⁷ Surin Pitsuwan, *Islam di Mungthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani...*, hlm. 30-31

²⁸ Erni Budiwanti, *“Forced Cultural and Assimilation and it’s Implication for the Continuation Pattani Muslim’s Identity”* ..., hlm. 115-116

C. Umat Islam Patani di bawah Rezim Pemerintahan Thailand

Segera setelah diterapkan kebijakan integrasi reformasi administrasi Siam terhadap Patani, struktur politik kerajaan Melayu Patani mengalami perubahan, jabatan raja dicopot, raja kehilangan sumber penghasilan dari pajak, kemudian memancing kemarahan dari pihak raja. Kemarahan tersebut diilustrasikan raja-raja Patani dengan berbagai pemberontakan. Gerakan pemberontakan melawan Thailand tersebut dikoordinasi oleh raja Abdul Kadir Kamaruddin (raja terakhir Patani). Pertama-tama, para raja menolak melaksanakan perintah pemerintah Thailand mengikuti kebijakan reformasi administira dengan memboikot semua pertemuan yang diadakan pejabat-pejabat mereka sebagai raja.²⁹

Pemberontakan berlanjut hingga berakhir dengan ditangkapnya Abdul Kadir Kamaruddin dan dipenjarakan di Phitsanulok hingga tahun 1916. Setelah dibebaskan dari penjara, sultan dipindahkan untuk tinggal di Kelantan. Perjuangan yang dipelopori raja Abdul Kadir Kamaruddin tersebut menginspirasi rakyat Melayu Patani untuk meneruskan perjuangan melawan ketertindasannya oleh Siam, melalui pemberontakan Namsai (sebuah kampung di Patani), Patani, menolak untuk membayar pajak dan sewa tanah ke pemerintah Siam sebagai respon terhadap penolakan reformasi pendidikan yang diperkenalkan tahun 1921,³⁰ dan undang-undang Pendidikan Dasar Wajib 1921 yang mewajibkan seluruh anak-anak Patani sekolah di sekolahan negeri selama empat tahun untuk

²⁹ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 33

³⁰ Aphornsuwan Thanet, "The Origins Of Malay Muslim Separatism In Southern Thailand", (Asia Research Institute, Working Paper Series, No. 32, October 2004), hlm. 18-19

belajar bahasa Thai.³¹ Melayu Patani melihat hal aturan ini sebagai serangan terhadap budaya atas program Thaisasi. Dalam pemberontakan ini, terjadi bentrokan antara warga desa Namsai dengan aparat keamanan dengan jumlah korban terbanyak dari kalangan Melayu Patani.

Dalam banyak hal, pemberontakan Namsai merupakan suatu peristiwa yang unik dalam sejarah gerakan kemerdekaan Patani, dan menentukan arah bagi peristiwa-peristiwa seperti itu di kemudian hari.

Perlawanan raja-raja Melayu di utara pun terjadi terhadap Inggris, bahkan pemberontakan-pemberontakan di kesultanan-kesultanan tersebut merupakan hal lazim, namun Inggris berhasil mengambil hati sultan-sultan tersebut dan menjatuhkan persekutuan mereka dengan para ulama. Sebaliknya, Siam menghadapi dua golongan Patani. Yakni kerabat raja dan para ulama. Kedua golongan itu saling mendukung dan bekerjasama dalam perjuangannya melawan kekuasaan Siam.³²

Abdul Kadir Kamaruddin berhasil meyakinkan raja-raja Melayu, bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membebaskan saudara-saudara mereka atas penindasan negara Thailand. Sehingga, tindakan Abdul Kadir Kamaruddin mendapat dorongan dan dukungan dari raja-raja Melayu. Dorongan dan dukungan raja-raja Melayu tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran mereka bahwa suatu

³¹ Moshe Yegar, *Between Integration And Seccesion: The Muslim Communnities Of The Southern Philipines, Southern Thailand, And Wetern Burma/Myanmar*, (USA: Lexington Books, 2002), hlm. 89

³² Surin Pitsuwan, *Islam Di Mungthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani...*, hlm.

saat jabatan dan kekuasaan mereka pun akan digerogeti oleh Inggris, seperti yang telah dilakukan pemerintah Thailand terhadap raja Patani.

Walaupun tidak mendirikan organisasi resmi, Abdul Kadir Kamaruddin berhasil menata jalan dan hubungan di kalangan pro-Melayu di kesultanan-kesultanan Malaya Utara, sebagai sekutu-sekutu dalam perjuangan kemerdekaan Patani di masa mendatang. Dukungan tersebut, dirasa cukup dan berhasil ia kerahkan tahun 1922 untuk menghentikan kampanye “men-Thai-kan” provinsi-provinsi Melayu di Thailand Selatan.³³

Kebijakan dalam pendidikan semakin diperketat, manakala sekolah negeri tersebut tidak hanya mengajarkan kurikulum sekuler Thai, tetapi juga mencakup pengajaran dalam etika Budha, dengan biarawan sebagai guru pelayarannya. Hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap umat Islam karena menyerang secara langsung budaya, agama, dan bahasa Melayu Patani. Akhirnya, masyarakat Patani tidak menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang berkurikulum sekuler.

Di bidang politik dan hukum, meskipun hukum Islam dibiarkan berjalan, terutama dalam masalah pernikahan, perceraian, dan warisan, orang Melayu Muslim belum puas dengan otonomi agama. Mereka menuntut otonomi politik. Dalam pemahaman mereka, bentuk lainnya otonomi, seperti di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan agama dapat dicapai melalui politik otonomi. Dipimpin

³³ Ibid, hlm. 53

oleh seorang pemimpin agama, Haji Sulong, menerbitkan permohonan, sebagai berikut:³⁴

1. Seorang pemimpin memiliki otoritas penuh untuk mengatur empat provinsi di Selatan. Pemimpin ini memiliki otoritas penuh untuk menghentikan, menggantikan, dan memilih semua pejabat pemerintah di empat provinsi. Pemimpin harus penduduk asli yang ditanggung atau berasal dari salah satu empat provinsi dan dipilih oleh seluruh orang di empat provinsi.
2. Semua pendapatan daerah dan sumber daya alam yang berasal dari empat provinsi harus dimanfaatkan demi kepentingan umum di Patani.
3. Mengadakan pelajaran Bahasa Melayu di peringkat Sekolah Dasar sehingga ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebelum mempelajari bahasa Siam/Thailand.
4. 80% dari para pejabat pemerintah di masing-masing provinsi harus Muslim.
5. Bahasa Melayu dan Siam/Thailand harus menjadi bahasa rasmi.
6. Pengakuan hukum Islam, dan pelaksanaannya dalam otonomi pengadilan Islam, yang dipisahkan dari pengadilan sipil, dengan Qadhi sebagai hakim Muslim.
7. Pembentukan badan Islam yang mempunyai wewenang penuh untuk mengatasi masalah yang dihadapi Muslim bawah kendali pemimpin sebagaimana dimaksud dalam poin pertama.

³⁴ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik...*, hlm. 197

Akibat, dilaksanakannya kebijakan integrasi Thailand terhadap Patani, memancing pemberontakan dari kalangan elit Patani dan gerakan bawah tanah dari kalangan rakyat biasa Patani. Pemberontakan dan gerakan bawah tanah tersebut mendapat dukungan dan respon dari dunia internasional, khususnya dari negara Arab dan tetangga (Malaysia).³⁵

Untuk pertama kalinya, isu Patani menarik perhatian internasional semakin meluas termasuk Liga Arab dan PBB.³⁶ Langkah yang paling penting adalah penciptaan pada februari 1944, dari Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR) atau Asosiasi Raya Melayu Patani di Kelantan. Ini menjadi organisasi untuk mengkoordinasikan berbagai elemen bekerja untuk pembebasan akhir Patani Raya. Itu mendapat dukungan dari kelompok-kelompok Melayu di Thailand dan juga dari Partai Nasionalis Melayu di Malaya. Situasi itu intens dilakukan. Operasi gerilya mulai bergerak melintas perbatasan dari dalam Malaya ke Thailand Selatan. Pemimpin keagamaan di kedua sisi perbatasan itu menyerukan jihad (perang Suci) terhadap pihak Thailand.

³⁵ Erni Budiwanti, "*Minoritas Muslim di Filipina, Thailand dan Myanamar: Masalah Resepsi Politik*", dalam Riza Sihbudi, *Problematika Minoritas Muslim di Asia tenggara: Kasus Moro, Patani, dan Rohingya*, (Jakarta: Puslitbang Politik dan Kewilayahan, LIPI, 2000), hlm. 129

³⁶ Thanet Aphornsuwan, *History and Politics of The Muslims Thailand*, (Bangkok: Thammasat University, 2003), hlm. 24

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

Ada tiga faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Islam Patani yaitu pertama, lemahnya pemerintahan kerajaan Melayu Patani di bidang ekonomi, pertahanan dalam negeri. Kedua, persengketaan dengan kerajaan Siam sebagai musuh tradisi bangsa Melayu, penyerangan kerajaan Siam terhadap Patani pada tahun 1785. Ini disebabkan kekuatan pertahanan musnah akibat seorang rakyat Patani keturunan Siam membocorkan rahasia pertahanan kepada pihak Siam. Ketiga, akibat dari kemelut politik dalam Istana, berawal ketiadaan pengganti yang terdekat menyebabkan keadaan politik Patani menjadi kucar-kacir. Para pembesar negeri turut terlibat dalam perebutan kuasa sehingga raja Patani di anggap sebagai boneka. Kekacauan politik itu secara langsung telah menjejaskan kemajuan ekonomi, saudagar-saudagar asing tidak lagi berminat untuk berniaga di Patani.

Setelah kerajan Melayu Patani jatuh dalam kekuasaan pemerintahan Thailand, dan pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang merugikan umat Islam yaitu: kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Thailand seperti pembaharuan di bidang ekonomi, politik, budaya dan pendidikan, yang bertujuan untuk menggantikan identitas kultural dan agama orang Melayu-Muslim dengan identitas kultural Siam/Thai yang berlandaskan Budhisme. Pemerintahan percaya bahwa kesadaran hanya dapat dicapai melalui rancangan sosial-budaya yang

berdasarkan konsep nasionalisme, kebudayaan Siam dan agama Budha. Dengan kesadaran tersebut, pemerintahan yakin dapat menumbuhkan adat resam Siam.

Pada saat pemerintahan Thailand melancarkan berbagai program pembaharuan dengan tujuan untuk menjadikan semangat kebangsaan Thai/Siam sebagai pegangan hidup orang-orang Siam/Thai tidak terkecuali juga masyarakat Melayu Patani. Dengan semangat pembaharuan ini langsung menyentuh dasar-dasar eksistensi yang paling dalam, yang memberi dampak negatif dalam kehidupan umat Islam Patani. Bagi masyarakat Melayu Patani tidak pernah merasa sebagai bagian dari bangsa Thai. Oleh karena itu, mereka tidak ingin diatur oleh Bangkok, mereka ingin mengatur diri mereka sendiri.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Thailand diharapkan tidak diskriminasi dalam membuat kebijakan. Semua warga negara hendaklah dipandang sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan rukun dan agama, sehingga semua warga negara dapat hidup rukun dan damai antara sesama.
2. Kepada umat Islam Melayu Patani diharapkan teguh pada keyakinannya dan terus berjuang untuk mencapai cita-cita hakiki (Merdeka).
3. Dalam tulisan ini masih kurang mendetail terutama dalam penggunaan bahasa, karena keterbatasan bahasa yang dimiliki penulis. Dan memberi kesempatan kepada penulis lain yang ingin mengangkat tentang sejarah perjuangan umat Melayu Patani di Selatan Thailand.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bangnara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, Bangkok: Penal Penyelidik Angkatan al-Patani, 1967.
- A. Bangnara, *Sejarah Patani Dahulu dan Sekarang*, Kota Bharu, Kelantan: Pustaka Aman Press, 1977.
- Abdul Halim Bashah (Bahar), *Raja Campa & Dinasti Jembal Dalam Patani Besar, (Patani, Kelantan, Tarengganu)*, Pustaka Reka, Kelantan, 1994.
- Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, Kedah: Pustaka Darussalam, 1994.
- Ahmad Umar Capakai, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam Selatan Thailand 1902-2002*, Malaysia, UKM, 2000.
- Aphornsuwan Thanet, “*The Origins Of Malay Muslim Separatism In Southern Thailand*”, Asia Research Institute, Working Paper Series, No. 32, October 2004.
- Alo Liliweri, *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Pustaka Nasional, 2013.
- Cahyo Pamungkas, “*The State Policies Towards Southern Border Provinces*”, dalam *Multiculturalism, Separatism and Nation State Building in Thailand*, Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI), 2004.

Dudung Abdulrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dudung Abdulrahman, *Metode Penulisan Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Dida Nuraida, “Kemajuan Ekonomi Dan Politik Kerajaan Patani Pada Masa Pemerintahan Raja Ungu 1624-1635” Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Elly M. Setiadi, dkk..., *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: KENCANA, 2006.

Faisol Hayee, Skripsi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Warga Minoritas Muslim Melayu Patani (Studi Kasus di Amphe Bannang Seta, Selatan Thailand)*, Banda Aceh: Fak. Ushuluddin, UIN AR-RANIRY, 2014.

Farid Mat Zain, *Minoriti Muslim di Thailand*, Selangor: L, Minda Bandar Baru Bangi, 1998.

Haji Saleh, Siti Hawa, *Hikayat Patani*, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan, 1992.

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-perubahan-sosial/>

<http://minang.awardspace.com>. Islam di Patani

Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002.

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

Mohd Zamber A. Malek, *Umat Islam Patani, Sejarah dan Politik*, Shah Alam: Perpustakaan Negara Malaysia, 1993.

- Moeflich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru kebangkitang Islam*, Bandung: FUKUSMEDIA, 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara: 2004.
- Malik Ibrahim, “Seputar Gerakan Islam di Thailand Sesuatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal”’, *Jurnal*, Vol. 10, No.1, Penang: Febuari 2012.
- Modh Zamberi A. Malek. *Patani dalam Tamadun Melayu*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1994.
- Moshe Yegar, *Between Integration And Seccesion: The Muslim Communnities Of The Southern Philipines, Southern Thailand, And Wetern Burma/Myanmar*, USA: Lexington Books, 2002.
- Nik Anuar Nik mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, Selangor: Perpustakaan Negara Malaysia, 2006.
- Pitsuwan, Surin, *Islam di Mungthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- P. Rudolf Yuniarto, *Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atas Dominasi “NasionalThailand”*, Jurnal, pdf.
- Paulus Rudolf Yuniarto, “Integration of Patani Malay: a Geopolitical Change Perspective”, dalam *Multiculturalism, Separatism and Nation State Building in Thailand*, Pusat Penelitian Sumberdaya Regional (Indonesia), 2004.
- Saifullah, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam Di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.

- Taufik Abdullah, Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Thitinan Pongsudhirak, “*The Malay-Muslim Insurgency in Siuthern thailand*”, dalam *A Handbook of Terorism and Insurgency in Southeast Asia*, Editor: Andrew T. H. Tan, USA: MPG Books, 2007.
- Teeuw, A dan Wyatt, *Hikayat Patani*, The Hague: Bibliotheca Indonesia 5., Martinus Nijhoff. P. 3.
- Tesis oleh Mala Rajo Sathian, *Ekonomi Change in Pattani Region c. 1880-1930: Tim and Cattle in the Era of Siam’s Administrative Reforms*, National University of Singapore: 2004.
- Uthai Dulyakasem, “Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Etnis: Kasus Muslim di Siam Selatan”, dalam *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Editor: Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, Jakarta: PL3ES, 1988.
- W. K., Che Man, *Muslim Separatism The Moros of Southern Philipines and The Malays of Southern Thailand*, Singapore: Oxford University Press, 1990.
- Wahyu Ilahi dan Harjani Hefni Polah, *Pengantar Sejarah Dakwah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Wyatt dan David, K, *Thailand A Short History*, Thailand: Silkworm Books, 1984.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas atas pengangkatan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Pengakuan Keaslian
- Lampiran 3 : Daftar Foto
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Wan Yunil Amri bin Wan Yunil Khairi
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Kedah Malaysia/14 Desember 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Malaysia/Melayu
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Jln. Inong Balee Lr. Ayahanda Desa Rukoh,
Darussalam Banda Aceh

9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Wan Yunil Khairi bin Wan Yaacob
 - b. Ibu : Som binti Watih
 - c. Pekerjaan : Buruh
 - d. Alamat : 321 Jln. Baru 17200 Rantau Panjang, Kelantan

10. Riwayat Pendidikan
 - a. Tadika (TK) : 1998
 - b. Sekolah Kebangsaan (SD) : 2007
 - c. Sekolah Menengah Kebangsaan (SMP) : 2009
 - d. Muasasah Assa'Qafah Al-Islamiah (SMA) : Tamatan 2011
 - e. Perguruan Tinggi : Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2017

Penulis

Wan Yunil Amri
Nim: 511102679

MOTTO

Landasan Motivasi

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu nasib kaum bangsa melainkan kaum bangsa itu mengubah nasib mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d, ayat : 11)

GAMBAR III
TENGGU ABDUL QADIR KAMARUDDIN IBNI AL-MARHUM
SULTAN SULAIMAN SHARIFUDDIN SYAH (1899-1902)



Sumber : Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*

Foto 3 : Merupakan Raja Melayu yang terakhir memerintah negeri Patani

GAMBAR IV
RAJA CHULALONGKONG ATAU RAMA V (1868-1910)



Sumber : M. Zamberi A. Malik, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*
Foto 4 : Raja Chulalongkong atau Rama V yang mengangkat Kesultanan Malayu Patani dan menjadikan Patani sebagian dari negeri Siam/Thai

GAMBAR V
PERDANA MENTERI THAILAND FIELD MARSHALL PHIBUN
SONGGRAM, PENTADBIRANNYA (1938-1945)



Sumber : M. Zamberi A. Malik, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*

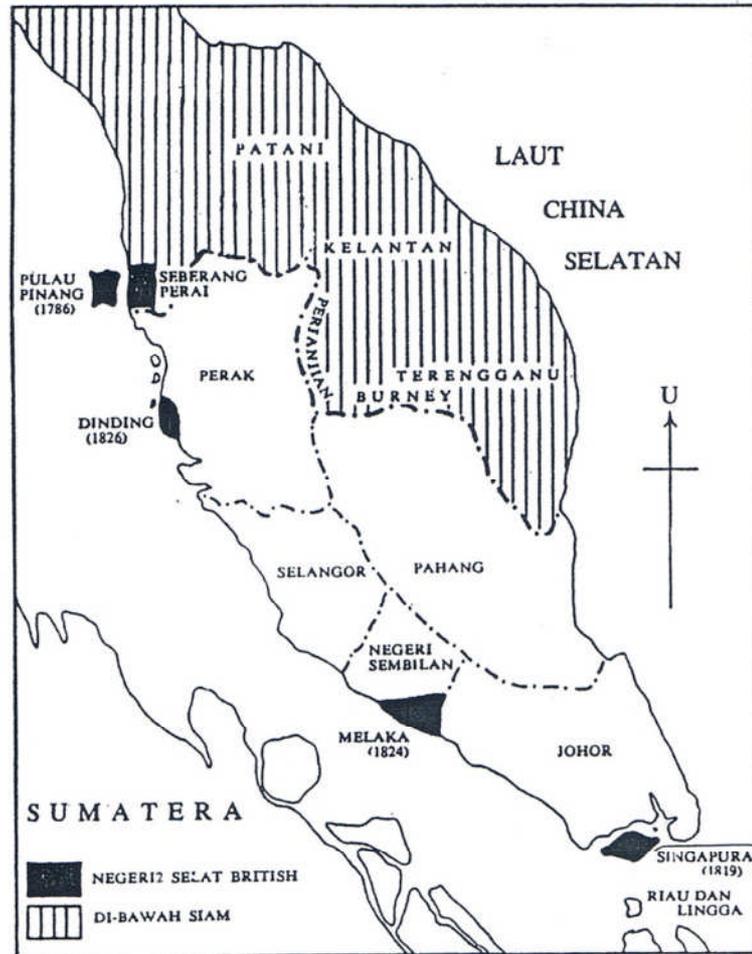
Foto 5 : Phibun Songgram memberikan tekanan hebat terhadap umat Islam Patani pada masa pentadbirannya.

GAMBAR VI
AL-SYAHID TUAN GURU HAJI SULONG (1947-1954)



Sumber : M. Zamberi A. Malik, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*
Foto 6 : Ulama yang berjaya menyatukan dan membangkitkan semangat umat
Islam Patani.

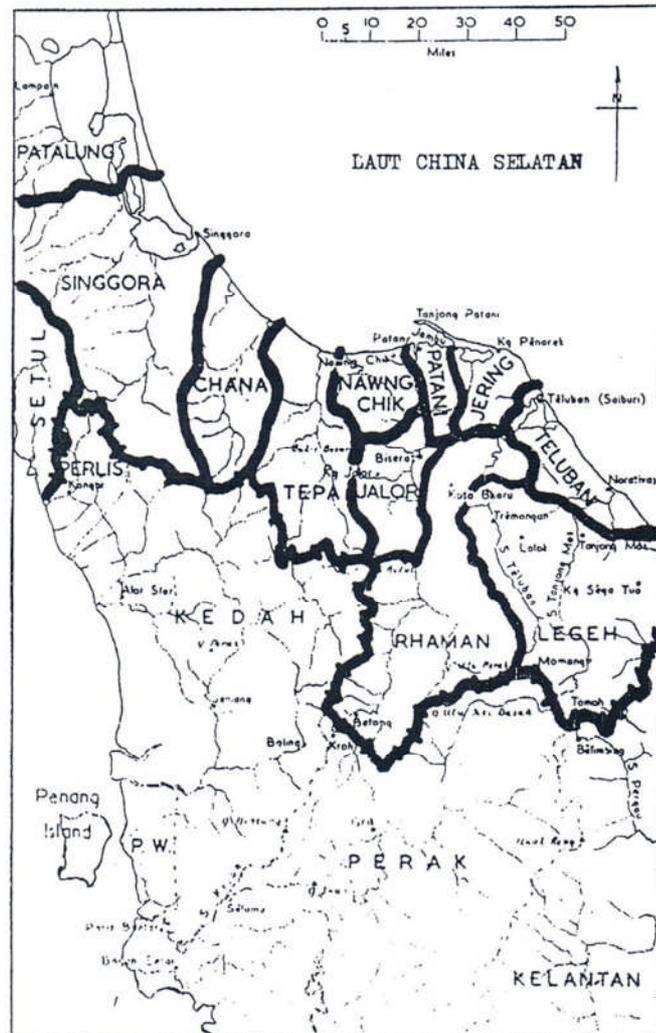
PETA
PATANI DAN NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA 1826



Sumber : M. Zamberi A. Malik, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*

Foto 7 : Empayar Melayu Patani di bawah kerajaan Siam/Thai 1826

PETA
TUJUH NEGERI PATANI (1816-1902)



Sumber : M. Zamberi A. Malik, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*

Foto 8 : Berakhirnya Empayar Melayu Patani dan dipecah menjadi tujuh negeri kecil di bawah pemerintahan Thailand.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Humaniora

Diajukan Oleh:

WAN YUNIL AMRI BIN WAN YUNIL KHAIRI

NIM: 511 102 679

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Misri A Muchsin, M.Ag
NIP: 19630302 199403 1 001



Drs. Anwar Daud M. Hum.
NIP: 196212311991011 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



Marduati, M.A
NIP: 1973101620060042001

SURAT PENGAKUAN KEASLIAN

Assalamualaikom Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wan Yunil Amri bin Wan Yunil Khairi

Nim : 511102679

Fak/Jur : Adab dan Humaniora/SKI

Judul Skripsi : Jatuhnya Kerajaan Patani dan Dampak Perubahan pada
Kehidupan Masyarakat Melayu Patani

Mengaku dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah asli karya saya sendiri dan jika di kemudian pelanggaran-pelanggaran Akademik dalam penulisan ini maka saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 28 Januari 2017

embuat Perjanjian



Wan Yunil Amri
Nim: 511102679

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Humaniora**

**Pada Hari / Tanggal
Rabu 01 Januari 2017
04 Jumadil Awal 1438**

**Di
Darussalam-Banda Aceh
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH**

Ketua,



**Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M. Ag
(NIP: 196303021994031001)**

Sekretaris,



**Dra. Anwar Daud, M. Hum
(NIP: 196212311991011002)**

Penguji I,



**M. Thaib, Lc., M. Ag
(NIP: 195608191996031001)**

Penguji II,



**Dr. Hj. Nuraini A. Manan, M. Ag
(NIP: 196307161994022001)**

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh**



**Syarifuddin, MA., Ph. D
(NIP: 197001011997031005)**